

Perkembangan Ekonomi Terkini, Prospek, dan Arah Kebijakan

Memperkuat Momentum

Jakarta, 28 Desember 2017



*Perkembangan Ekonomi Terkini, Prospek ke Depan
Arah Kebijakan*





PERKEMBANGAN & TANTANGAN PEREKONOMIAN GLOBAL

Pemulihan Ekonomi Global Berlanjut

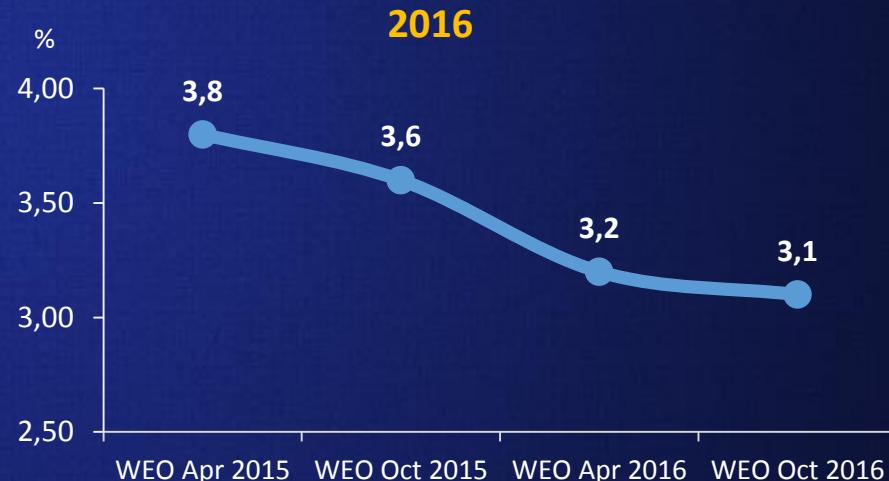
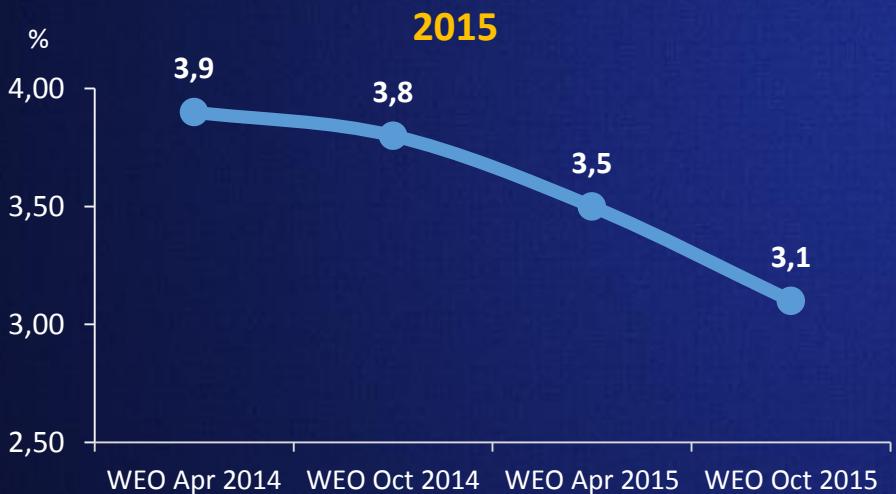
Perkembangan ekonomi global pada 2017 lebih baik dibandingkan dengan proyeksi pada awal tahun.



	2016	2017*	2018*
WORLD	3,2	3,6	3,6
Advanced Economy (AE)	1,7	2,1	2,0
US	1,5	2,2	2,2
Euro	1,8	2,2	1,9
Japan	1,0	1,4	0,7
Emerging Markets (EM)	4,3	4,6	4,8
China	6,7	6,8	6,5
India	7,1	6,9	7,2
WTV	1,4	4,2	3,6
Oil (USD per barrel)*	41	52	55
Commodity Prices (IHEX)	5,4	22,2	0,5
LIBOR 3 bulan	0,7	1,29	2,06

Pemulihan Lebih Tinggi dari Perkiraan Semula

Pada tahun-tahun sebelumnya, proyeksi pertumbuhan ekonomi global selalu di revisi ke bawah, untuk tahun 2017 dan 2018 proyeksi pertumbuhan justru di revisi ke atas.



Ekonomi Global: Lebih Baik Dan Lebih Merata



2017

Pemulihan ekonomi global lebih baik dibanding perkiraan

AE: PDB tumbuh akseleratif

EM: PDB tumbuh membaik



PDB '17↑,
ditopang C&I



PDB '17↑,
ditopang C&X



PDB '17↑,
ditopang C&X



PDB '17↑,
ditopang C&X
(*gradual rebalancing*)



PDB '17↓,
dampak temporer
demonetisasi & GST

2018

Pertumbuhan AE & Tiongkok tertahan, EM jadi pendorong

AE: akselerasi PDB tertahan



PDB '18 ↔,
C membaik terbatas
& I tertahan



PDB '18 ↓,
*slack labor market & slow
productivity growth*



PDB '18 ↓,
Aging population



PDB '18↓,
rebalancing berlanjut,
mitigasi fin.market



PDB '18 ↑,
rebound pasca
dampak temporer
demonetisasi & GST



Harga
Komoditas
(IHEx &
Minyak)↑

Pasar TK↑,
tp masih
ada *slack*

Inflasi
Tertahan



IHEx
melambat
& Minyak↑
terbatas

Pasar TK↑,
tp masih
ada *slack*

Inflasi
Meningkat

Respons Kebijakan

AE

- Normalisasi keb. moneter gradual
- Ruang Fiskal terbatas

EM

- Keb. moneter netral-akomodatif
- Fiskal konsolidatif

Respons Kebijakan

AE

- Normalisasi keb. moneter berlanjut secara gradual
- Ruang Fiskal masih terbatas

EM

- Keb. moneter netral
- Fiskal masih konsolidatif

WTV dan Harga Komoditas meningkat

Dampak pemulihan ekonomi dunia ini menyebabkan **volume perdagangan dunia** meningkat, yang selanjutnya mendorong peningkatan **harga komoditas dunia**...



WTV
(yo^y)

2016	1,4
2017	4,2
2018	3,6



Harga Minyak
(USD/brl)

2016	41
2017	52
2018	55



IHEx
(yo^y)

2016	5,4
2017	22,2
2018	0,5

PERMINTAAN DAN PENAWARAN MINYAK DUNIA



PERKEMBANGAN HARGA BATU BARA





PERKEMBANGAN & TANTANGAN PEREKONOMIAN DOMESTIK

Pertumbuhan Ekonomi Membuat Gradual di 2017

Pertumbuhan ekonomi tersebut didukung terutama oleh peningkatan ekspor komoditas serta akselerasi investasi...

PERTUMBUHAN EKONOMI SISI PENGELUARAN (% yoy)

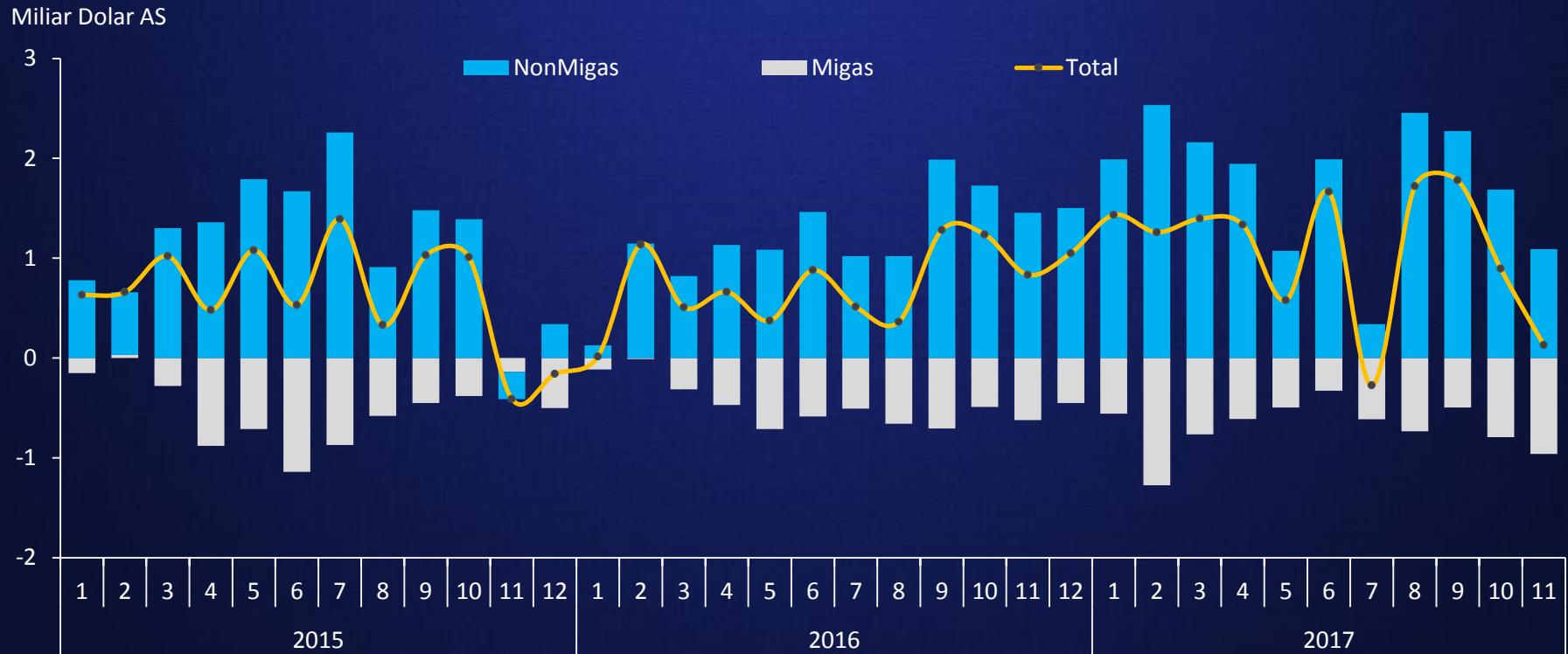
Komponen PDB Pengeluaran	2015	2016				2016	2017		
		I	II	III	IV		I	II	III
Konsumsi Rumah Tangga	4,96	4,97	5,07	5,01	4,99	5,01	4,94	4,95	4,93
Konsumsi Lembaga Nonprofit Melayani Rumah Tangga	-0,62	6,40	6,71	6,64	6,72	6,62	8,05	8,49	6,01
Konsumsi Pemerintah	5,32	3,43	6,23	-2,95	-4,05	-0,15	2,68	-1,93	3,46
Investasi	5,01	4,67	4,18	4,24	4,80	4,48	4,78	5,35	7,11
Investasi Bangunan	6,11	6,78	5,07	4,96	4,07	5,18	5,87	6,07	6,28
Investasi Nonbangunan	1,95	-1,20	1,70	2,16	7,07	2,45	1,49	3,26	9,58
Ekspor	-2,12	-3,29	-2,18	-5,65	4,24	-1,74	8,21	3,36	17,27
Impor	-6,41	-5,14	-3,20	-3,67	2,82	-2,27	5,12	0,55	15,09
PDB	4,88	4,92	5,18	5,01	4,94	5,02	5,01	5,01	5,06

Neraca Perdagangan Mencatat Surplus



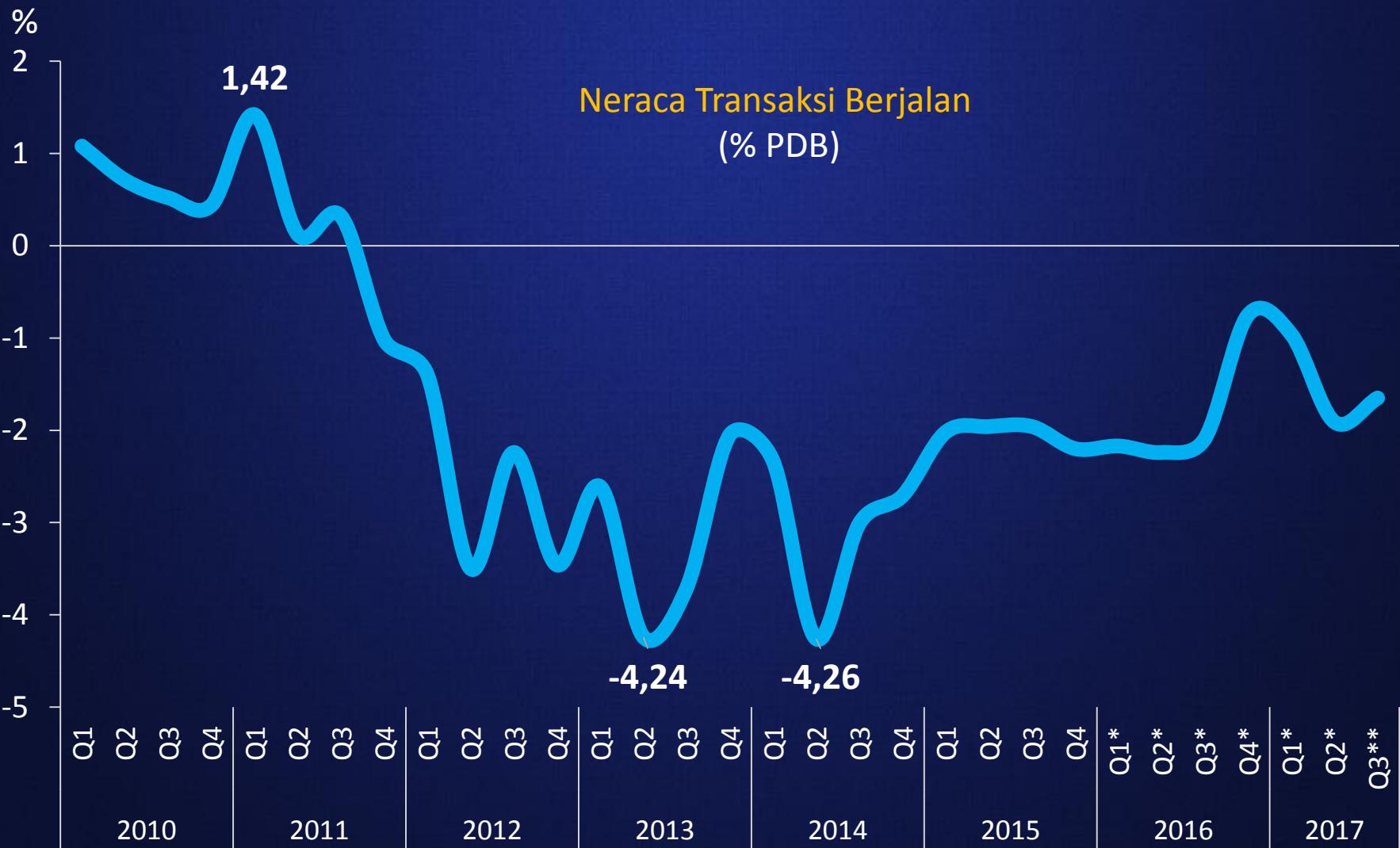
Sampai dengan November 2017, Neraca Perdagangan mencatat surplus 12,02 miliar dolar AS, lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 8,48 miliar dolar AS...

NERACA PERDAGANGAN



Neraca Transaksi Berjalan : Defisit Terjaga

Defisit Neraca Transaksi Berjalan mengalami perbaikan, jauh lebih rendah dibandingkan periode tahun 2013-2014.



Peringkat Investasi : Investment Grade oleh Lembaga Pemeringkat Utama

Indonesia telah mendapat peringkat layak investasi dari 3 lembaga pemeringkat utama dunia
Fitch kembali menaikkan peringkat investasi Indonesia

BBB

FITCH

BBB-



Below Investment Grade

BB+

JCRA

Moody's

R & I

S & P

BB

BB-

B+

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

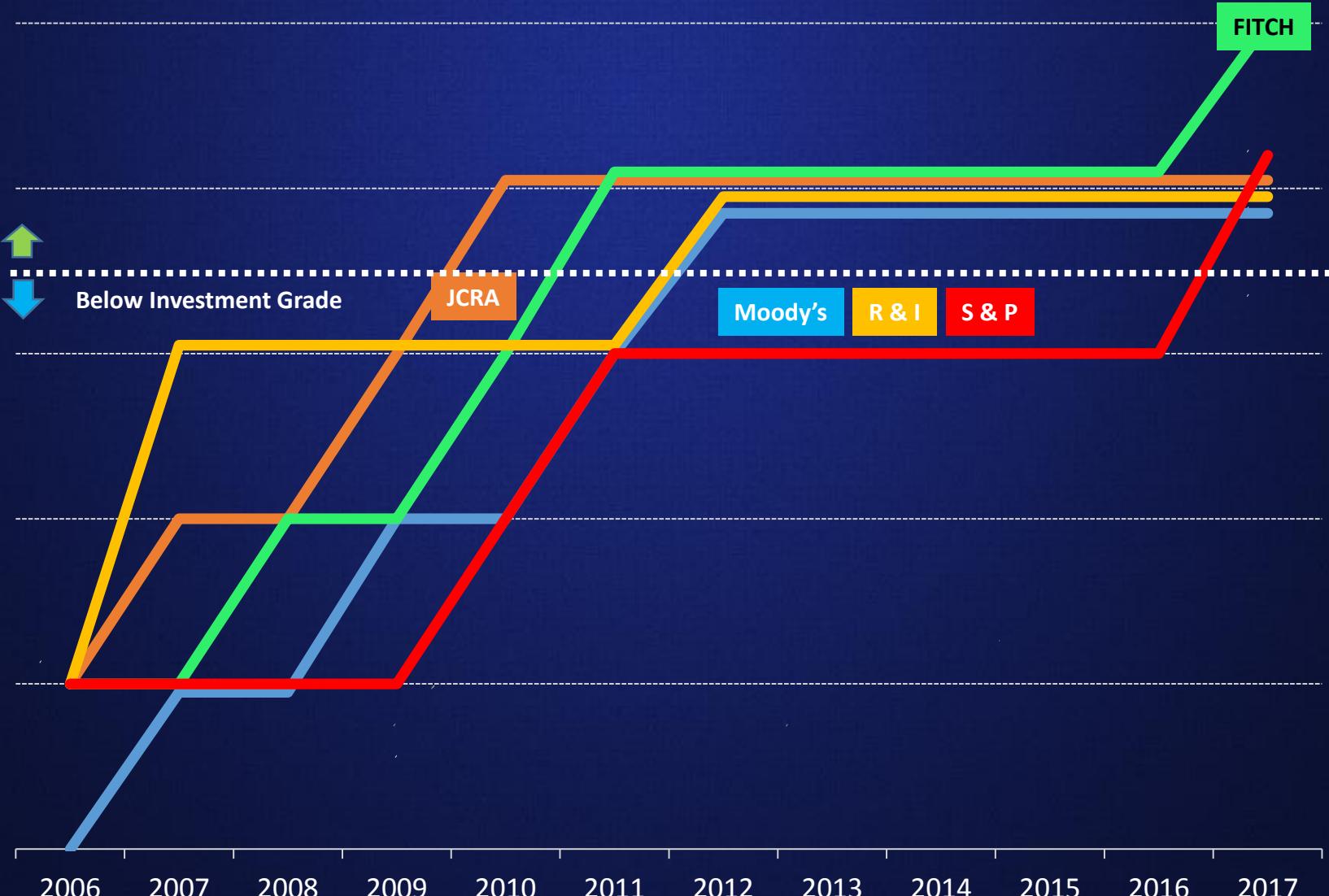
2013

2014

2015

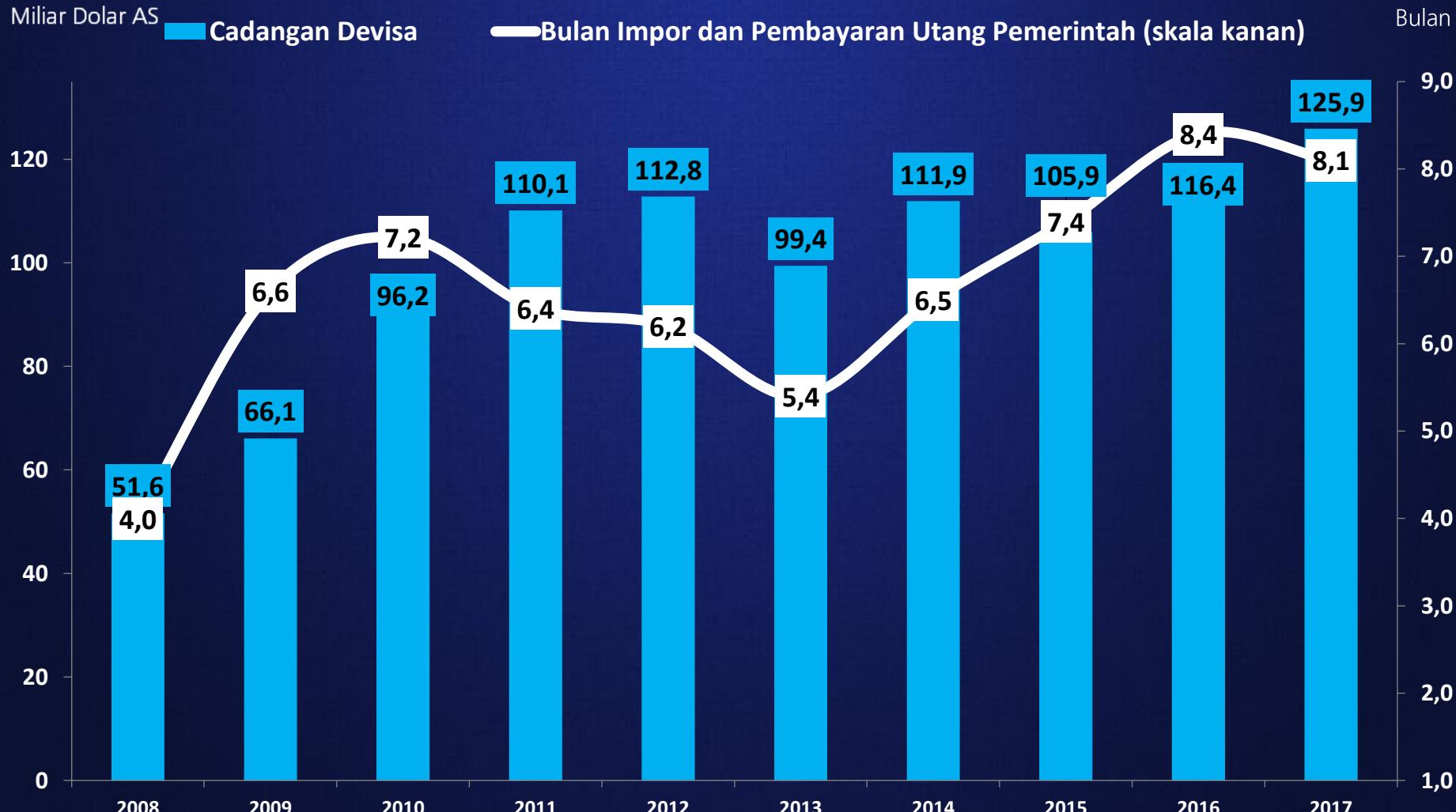
2016

2017

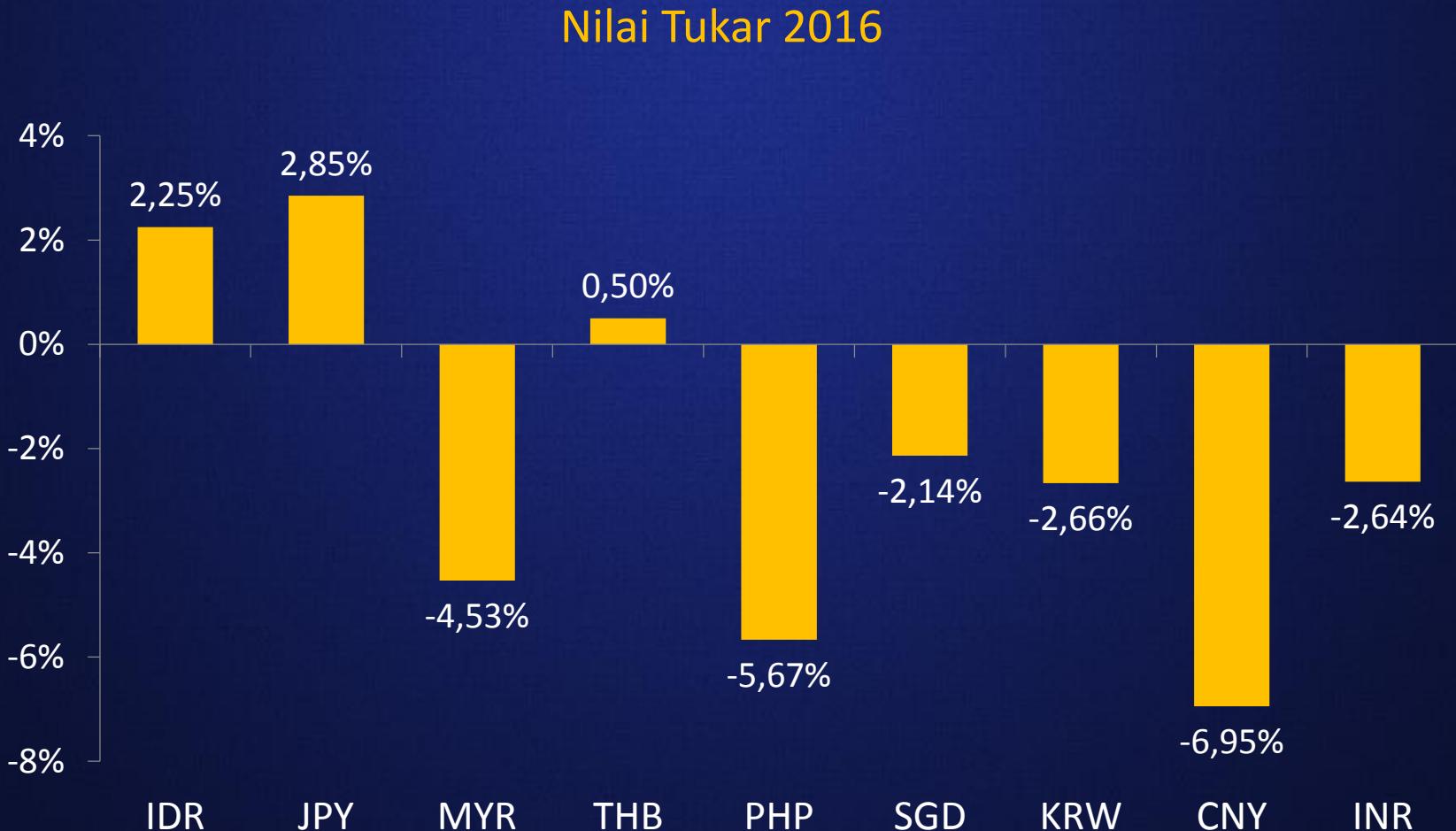


Cadangan Devisa Meningkat

- ✓ Cadangan devisa meningkat pada 2017, cukup untuk membiayai kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional.
- ✓ Pada November 2017, cadangan devisa tercatat sebesar 125, 9 miliar dollar AS



Nilai Tukar : Terbaik ke-2 di Asia setelah Yen Jepang (2016)

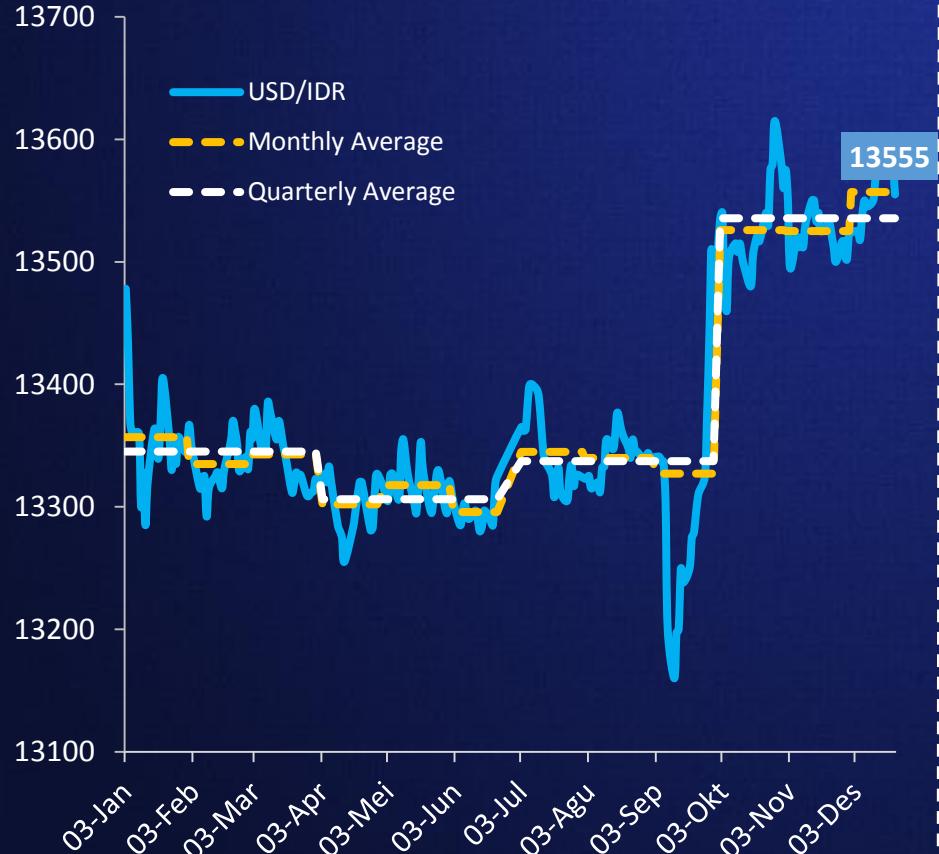


Rupiah Cenderung Stabil Sepanjang Tahun 2017

Rupiah cenderung stabil pada 2017 meski sempat mengalami tekanan yang bersumber dari eksternal pada awal triwulan IV 2017...

PERGERAKAN NILAI TUKAR RUPIAH

Rupiah per Dollar AS

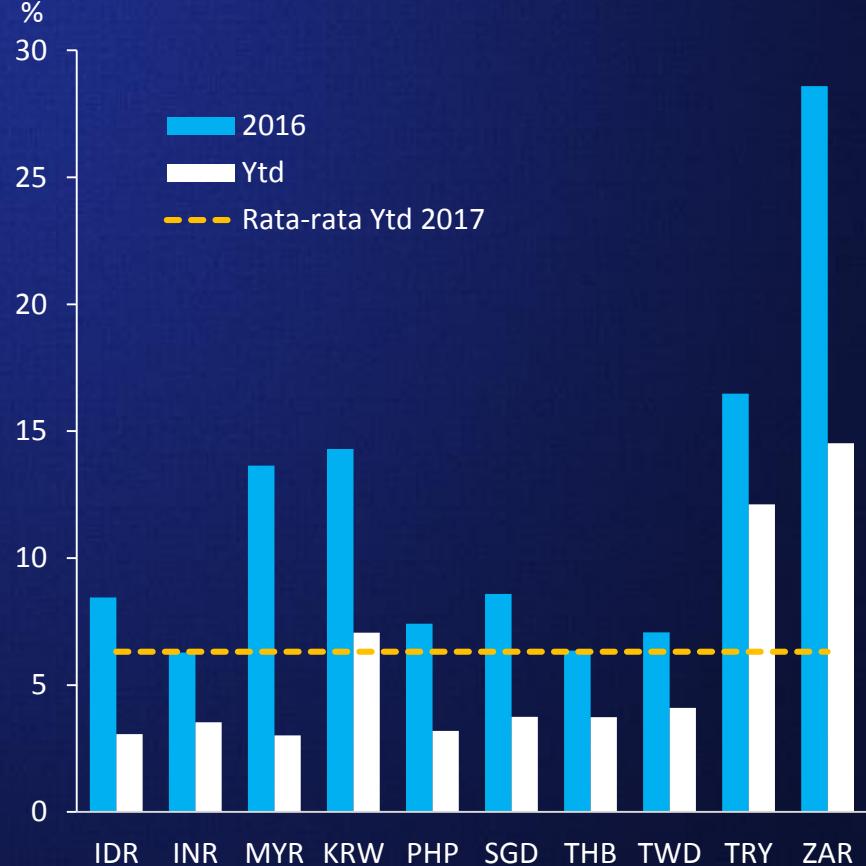


Sumber: Reuters (diolah)

Data s.d 21 Desember 2017

VOLATILITAS NILAI TUKAR – PEER GROUP

%



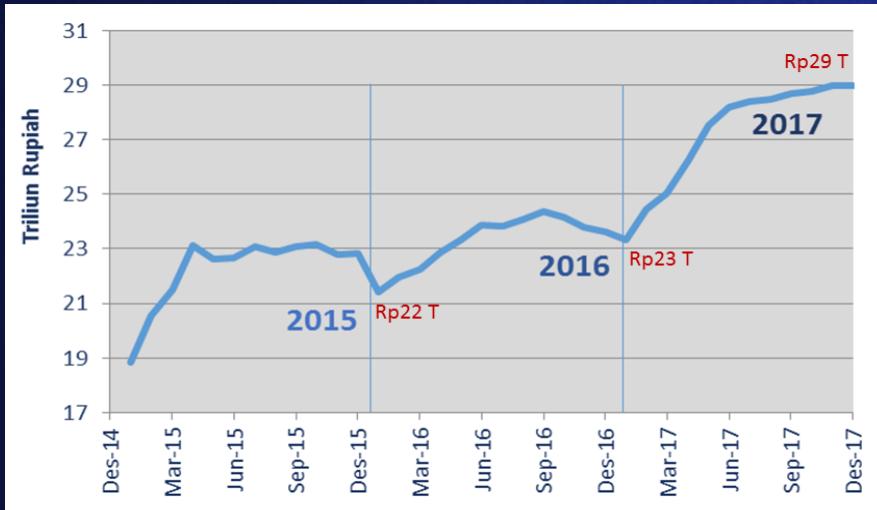
Sumber: Reuters, Bloomberg (diolah)

Data s.d 21 Desember 2017

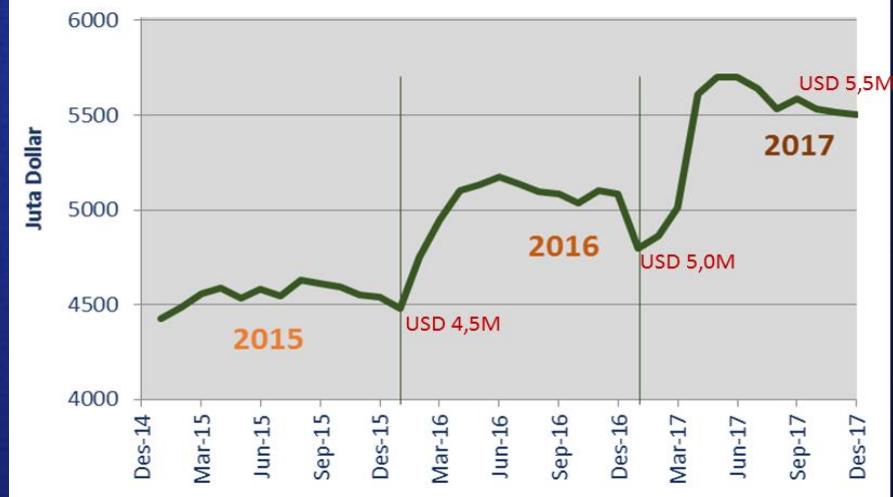
Perkembangan Volume Transaksi Pasar Keuangan

Stabilitas nilai tukar didukung oleh kondisi pasar keuangan yang semakin dalam

Transaksi Pasar Uang Rupiah



Transaksi Pasar Valuta Asing



Rasio Transaksi Derivatif terhadap Total Transaksi Valas



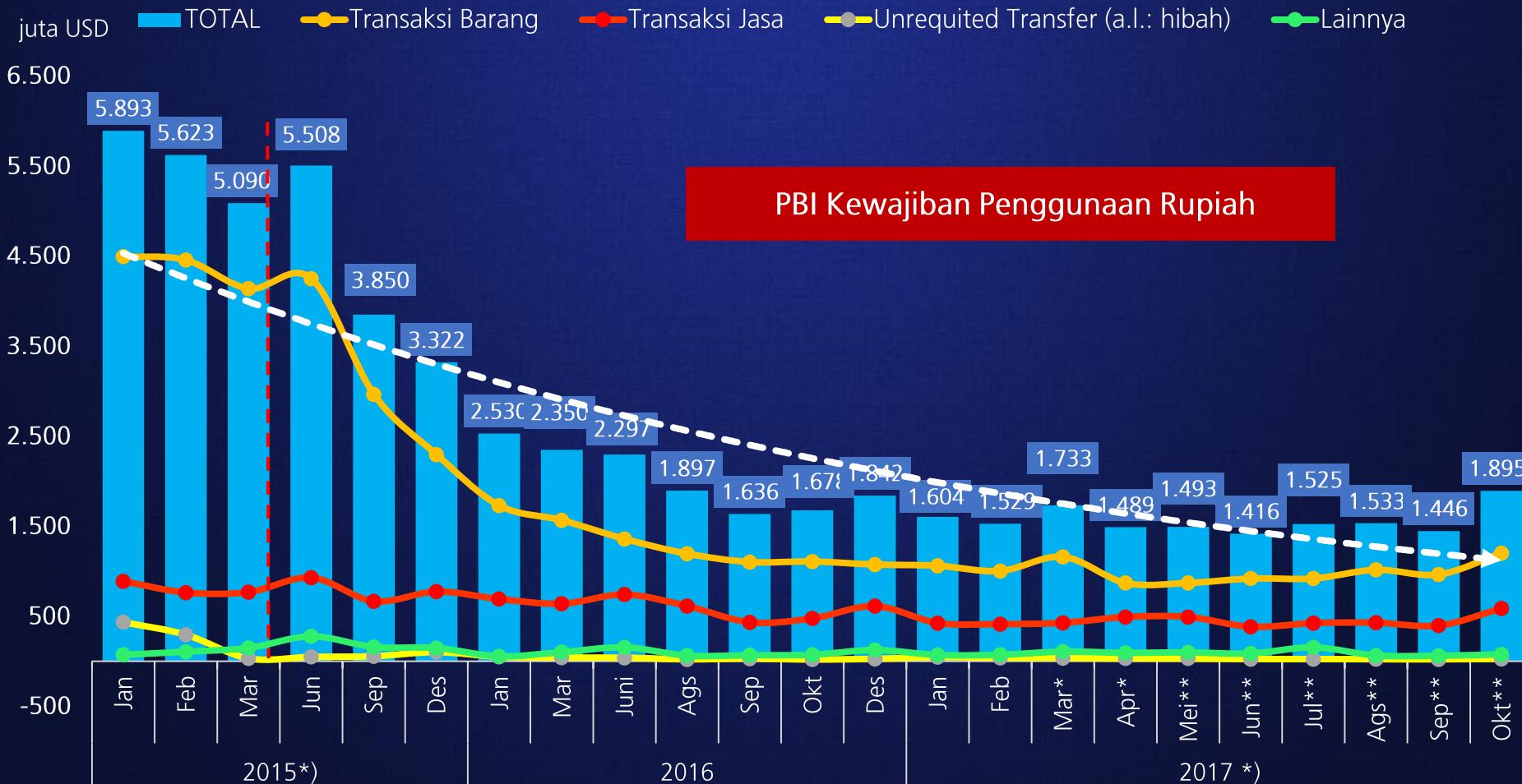
1. Volume transaksi pasar uang berkembang dari rata rata Rp23,6 triliun per hari (2016) **menjadi Rp28,9 triliun per hari** (2017).
2. Volume transaksi pasar valuta asing berkembang dari USD 5,0 miliar per hari (2016), menjadi **USD 5,5 miliar per hari** (2017).
3. Rasio transaksi derivatif terhadap total transaksi valas, telah meningkat dari 34% (2015), 39% (2016) dan pada **akhir 2017 mencapai 38%**.

Kewajiban Penggunaan Rupiah

Stabilitas Rupiah juga didukung penggunaan valas antar residen yang cenderung menurun pasca kewajiban penggunaan Rupiah

Transaksi Valas Antar Penduduk

TOTAL TRANSAKSI ANTAR RESIDEN DALAM VALAS



*) Angka Sementara

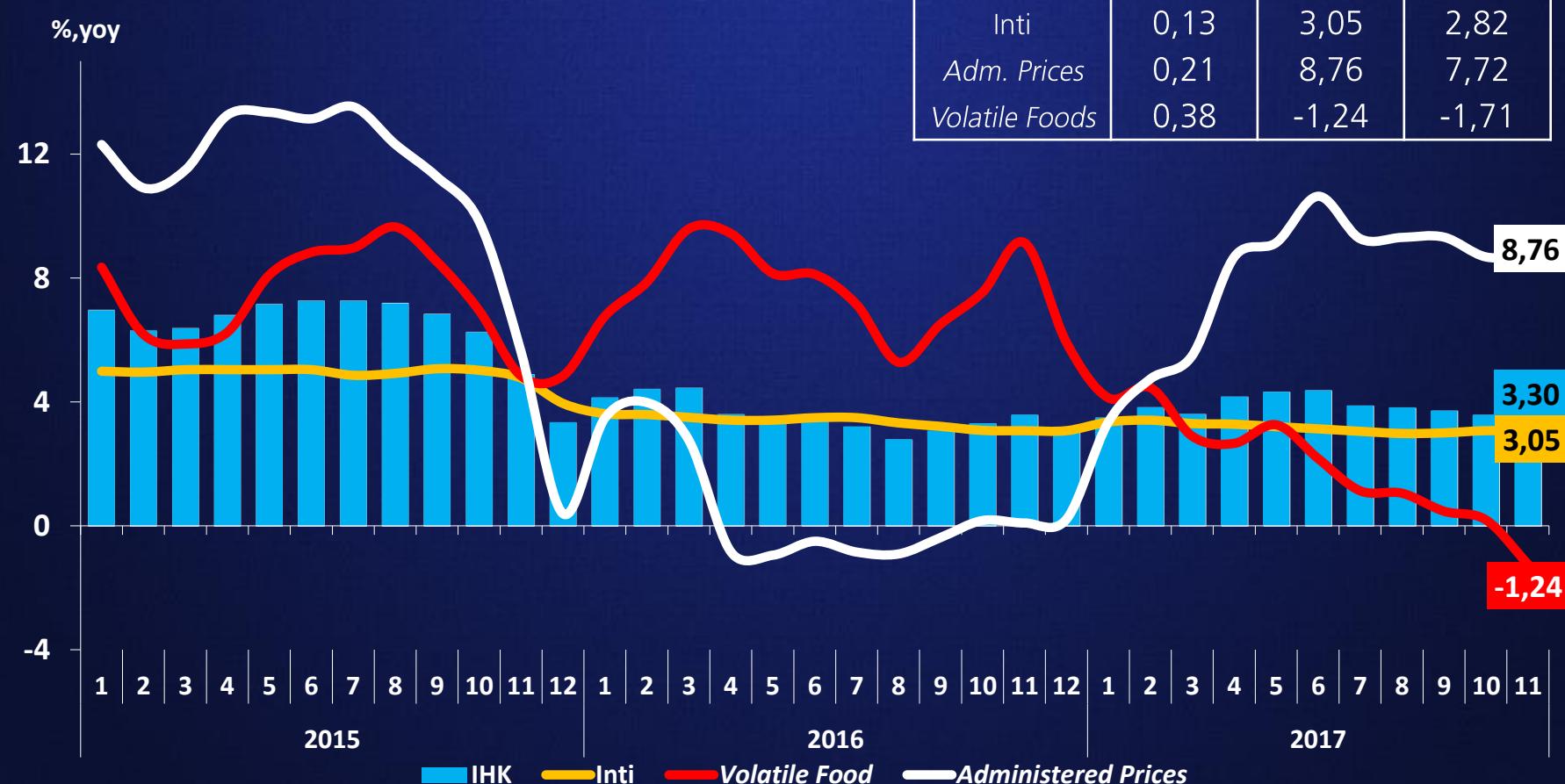
**) Angka sangat sementara

Sumber data : DSta & DPKL as per 12/11/17

Inflasi Terjaga pada Level yang Rendah

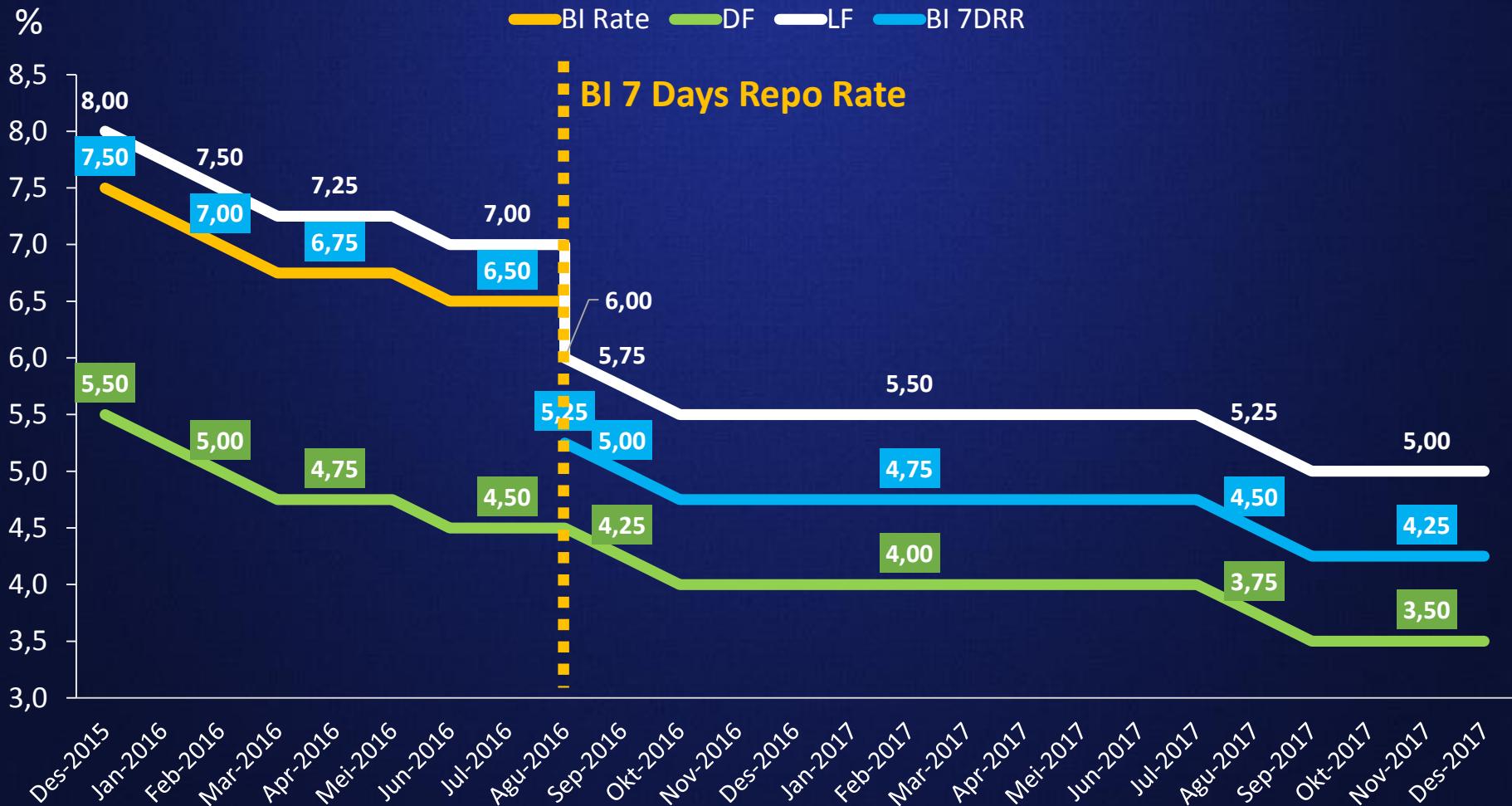
Terkendalinya inflasi terutama disumbang oleh rendahnya inflasi volatile food seiring dukungan pasokan yang memadai, kebijakan stabilisasi harga pangan oleh Pemerintah, dan harga pangan global yang rendah...

PERKEMBANGAN INFLASI



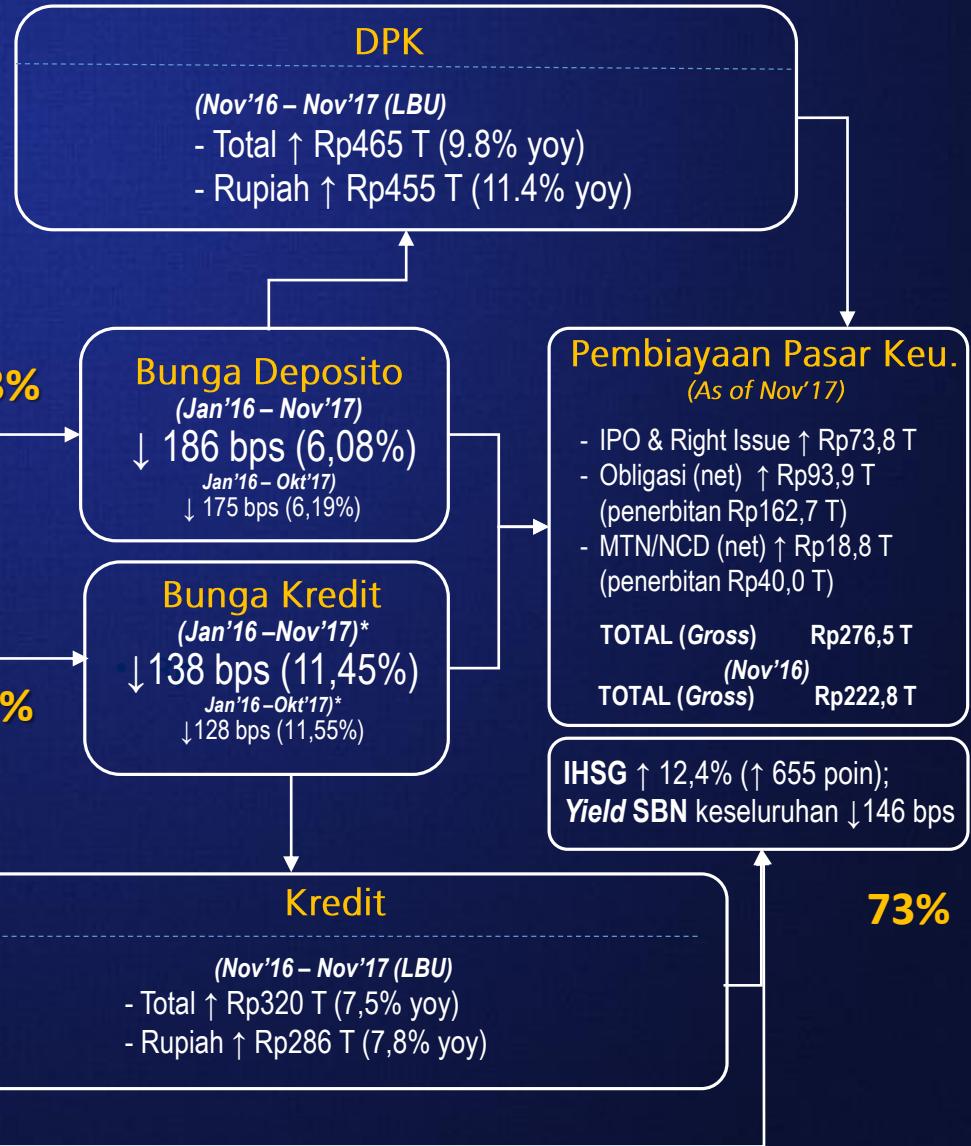
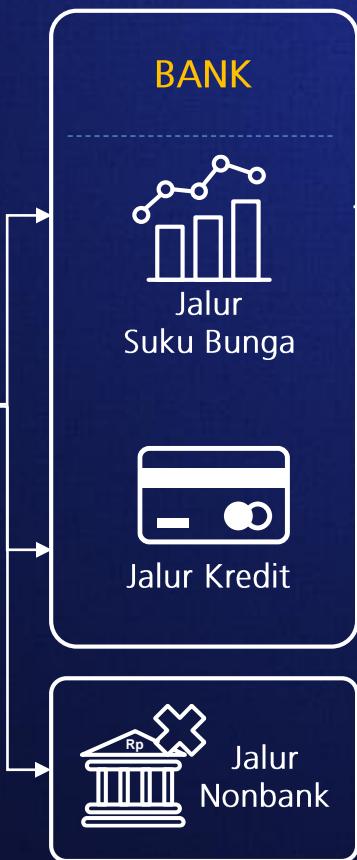
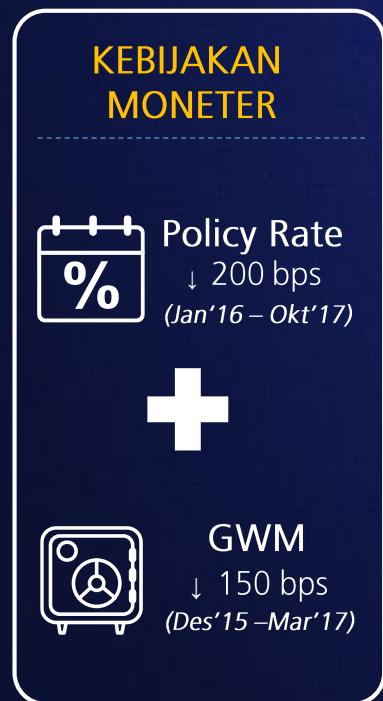
BI 7 Days Repo Rate

Suku bunga yang cenderung menurun konsisten dengan adanya ruang pelonggaran kebijakan moneter dengan rendahnya realisasi dan prakiraan inflasi ke depan di dalam kisaran sasaran yang ditetapkan, serta terkendalinya defisit transaksi berjalan dalam batas yang aman.



Transmisi Kebijakan Moneter

Transmisi jalur suku bunga berlanjut dengan suku bunga kredit dan deposito masih turun. Sementara, kredit tumbuh terbatas...



Pembiayaan Non-Bank Meningkat Sepanjang 2017

21

Pembiayaan ekonomi melalui pasar keuangan, seperti penerbitan saham, obligasi, dan medium term notes (MTN), terus tumbuh tinggi hingga mencapai 24,1% (yoY) pada November 2017...



Triliun Rupiah

	2016					2017				
	TW I	TW II	Tw III	November	Total*	TW I	TW II	Tw III	November	Total*
Total Pembiayaan Non Bank	23,6	88,8	50,4	45,7	222,8	41,0	118,9	59,8	18,7	276,5
Total o/w Emiten Sektor keuangan	21,2	45,5	23,2	19,6	81,6	28,7	47,7	27,8	7,3	126,8
Saham	1,7	39,6	14,1	18,8	38,7	10,1	47,5	11,2	2,4	73,8
o/w Emiten Sektor Keuangan	0,3	10,1	2,3	2,1	10,6	2,3	7,6	1,0	0,5	11,4
Obligasi	16,4	40,1	26,1	20,5	71,8	23,1	61,9	41,3	11,1	162,7
o/w Emiten Sektor Keuangan	16,4	27,8	18,2	14,2	57,1	20,0	33,5	22,1	4,8	88,7
<i>MTN and Promissory Notes + NCD</i>	5,5	9,1	10,2	6,4	20,9	7,8	10,0	7,4	5,2	40,0
o/w Emiten Sektor Keuangan	4,5	7,6	2,7	3,3	13,8	6,3	6,6	4,7	2,1	26,6

*Kumulatif Januari s.d. November

Sumber: KSEI (diolah)



PROSPEK DAN TANTANGAN KE DEPAM

Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi

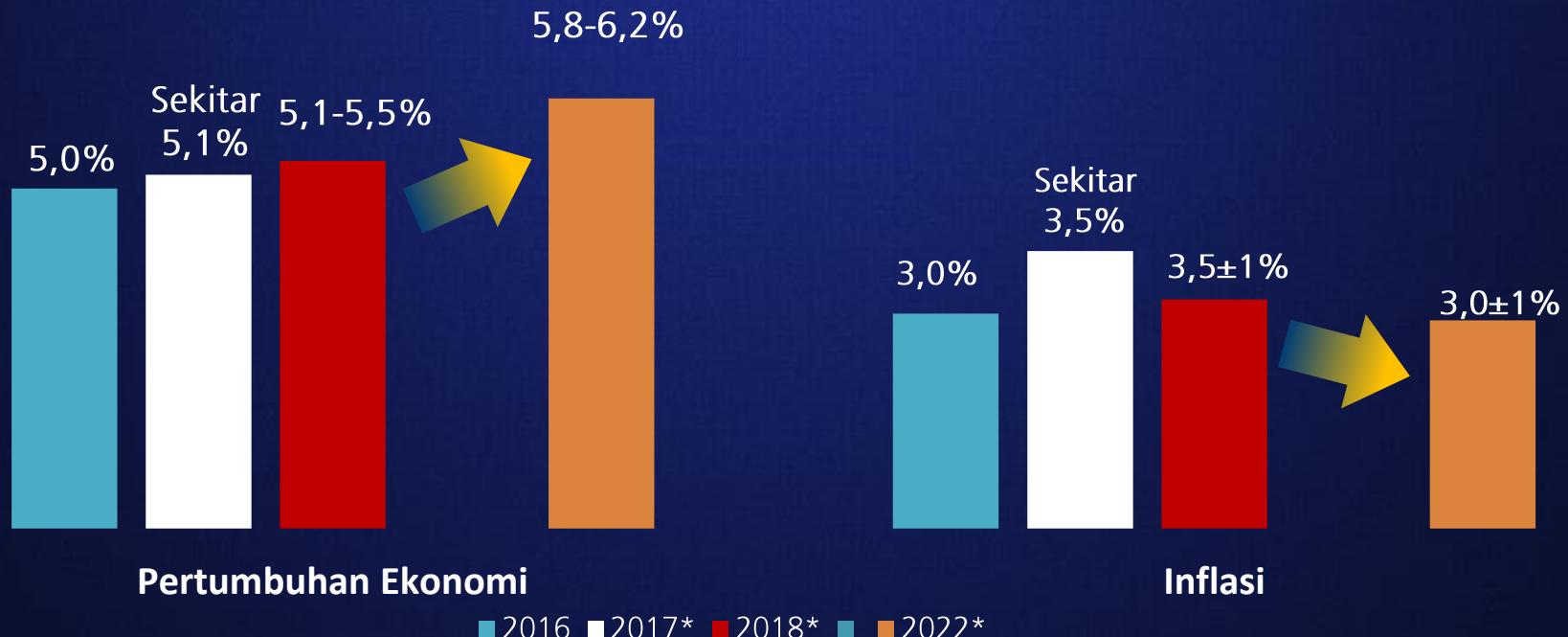
Pertumbuhan ekonomi berada dalam lintasan yang meningkat dibarengi dengan stabilitas makroekonomi yang terjaga...



Pertumbuhan ekonomi domestik terus meningkat dan dapat mencapai rentang 5,8-6,2% pada 2022



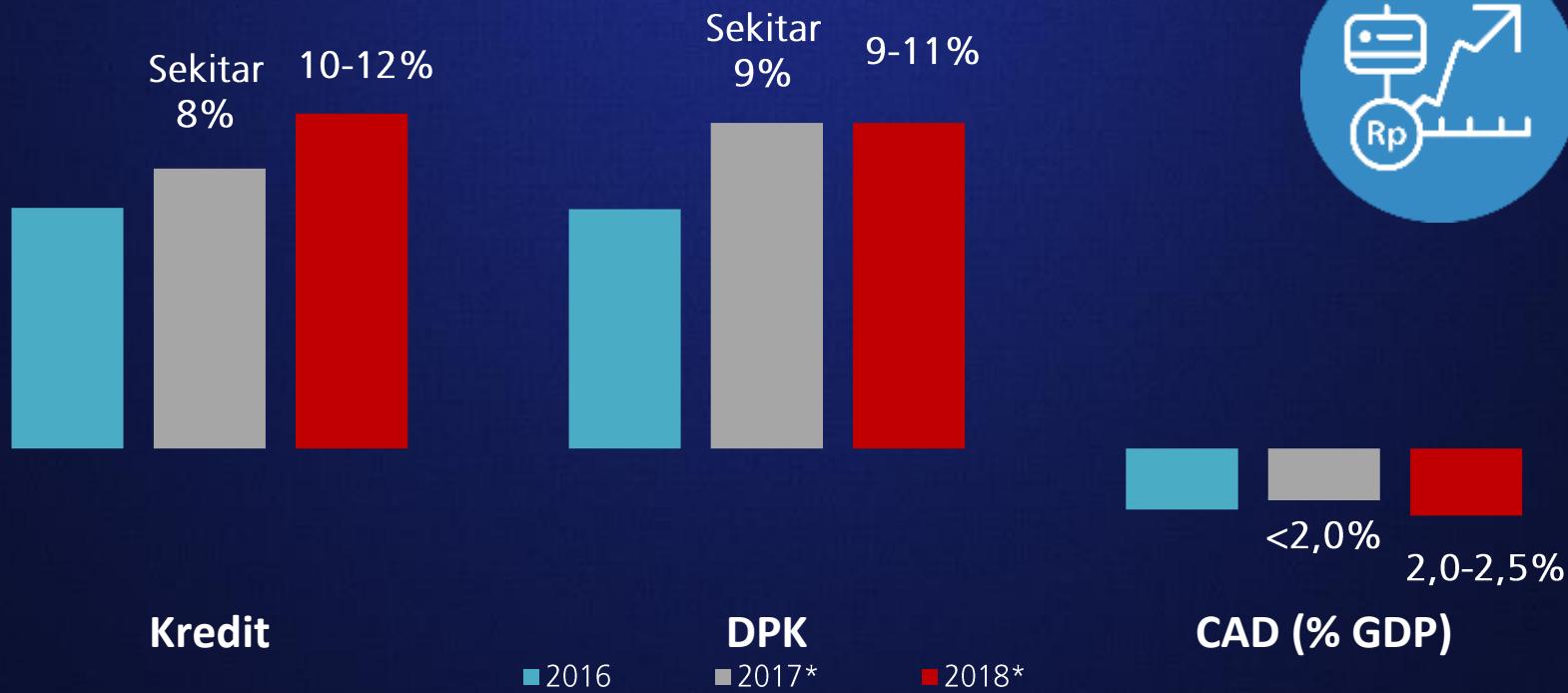
Inflasi akan tetap terkendali dalam rentang sasaran inflasi Bank Indonesia sampai dengan 2022



Intermediasi Perbankan & CAD

Kinerja intermediasi perbankan diperkirakan membaik, sementara defisit transaksi berjalan masih akan berada di bawah batas aman...

- DPK pada tahun 2017 diperkirakan tumbuh sekitar 9% sementara 2018 tumbuh dalam kisaran 9-11%
- Sementara kredit pada 2017 tumbuh sekitar 8% dan akan kembali meningkat pada 2018 menjadi 10-12%
- Defisit transaksi berjalan akan tetap terjaga dalam batas aman di bawah 3% PDB, yaitu <2,0% PDB pada tahun 2017 dan di kisaran 2,0-2,5% PDB pada tahun 2018



Sumber: Bank Indonesia

* Proyeksi Bank Indonesia

Risiko Jangka Pendek Perekonomian Global

Di tengah pemulihan yang terjadi, perekonomian global masih menghadapi tantangan jangka pendek yang perlu diwaspadai...

Normalisasi Kebijakan Moneter Negara Maju

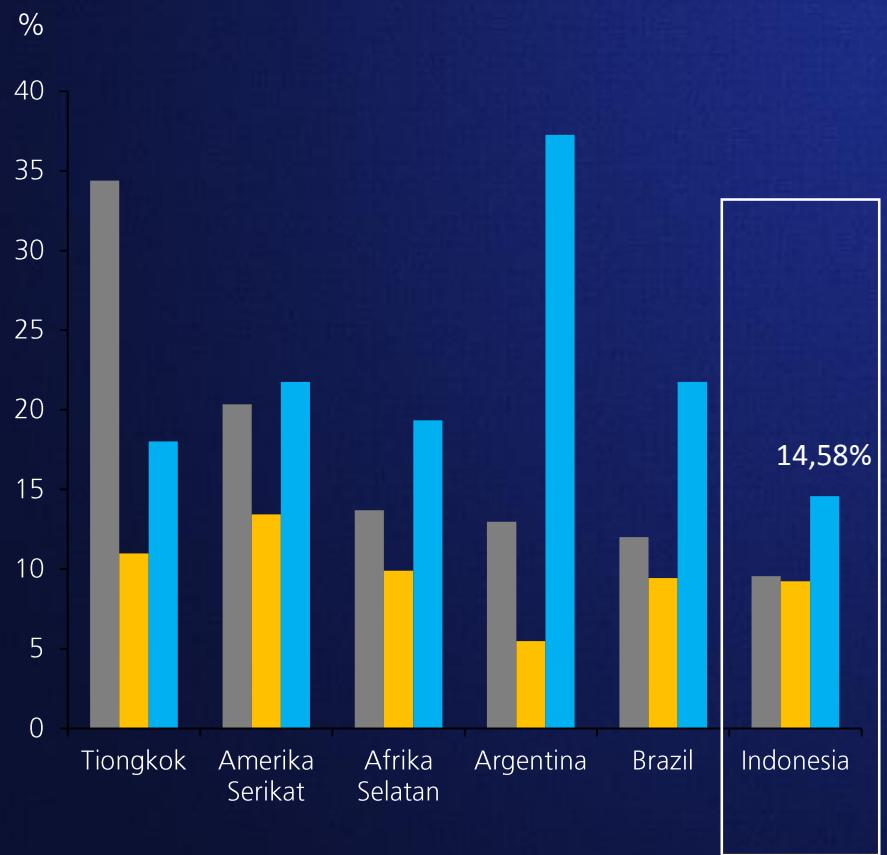
Terutama kenaikan FFR dan pengurangan aset neraca *The Fed* yang telah dimulai bulan Oktober 2017



Risiko Sistem Keuangan Global

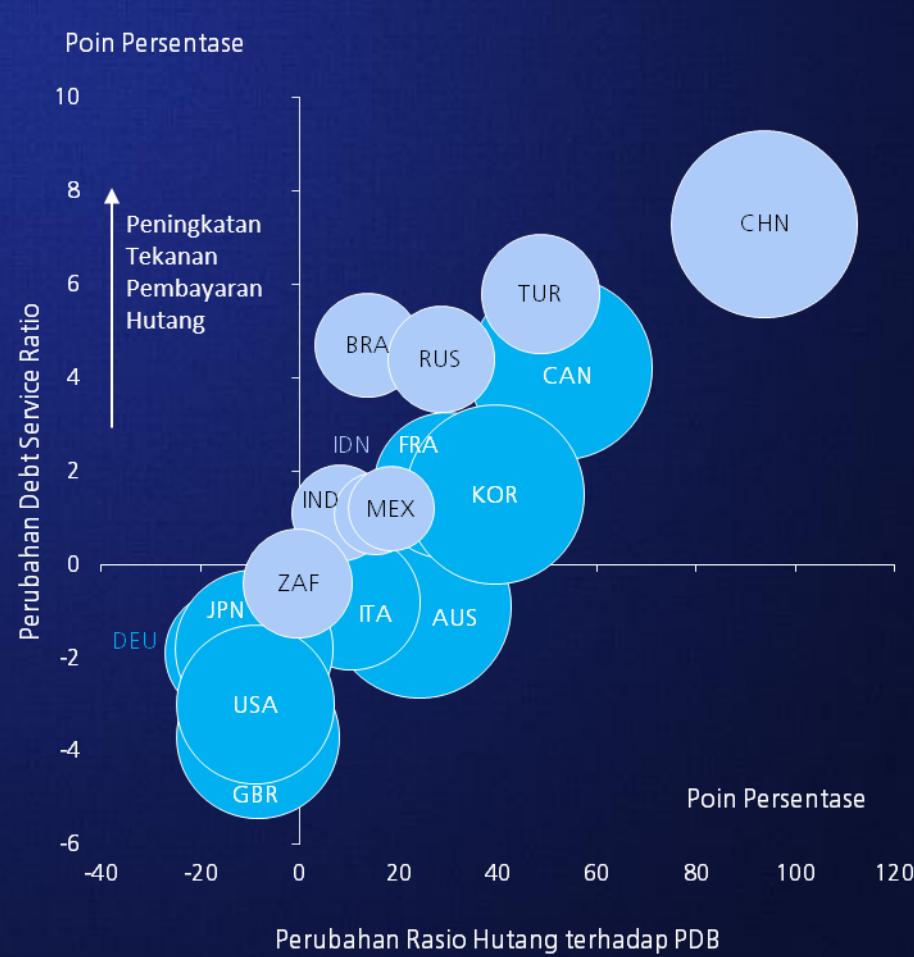
Prospek kesinambungan pertumbuhan ekonomi global juga dihadapkan pada peningkatan akumulasi kerentanan sistem keuangan global, ditandai dengan peningkatan harga aset pasar keuangan secara signifikan serta kenaikan *leverage* dan *Debt Service Ratio* korporasi non keuangan...

PRICE EARNING RATIO



■ Rata-rata 2000-2006 ■ Terendah Pasca Krisis Keuangan Global ■ 2017

UTANG KORPORASI NON KEUANGAN DAN DSR 2006-2016

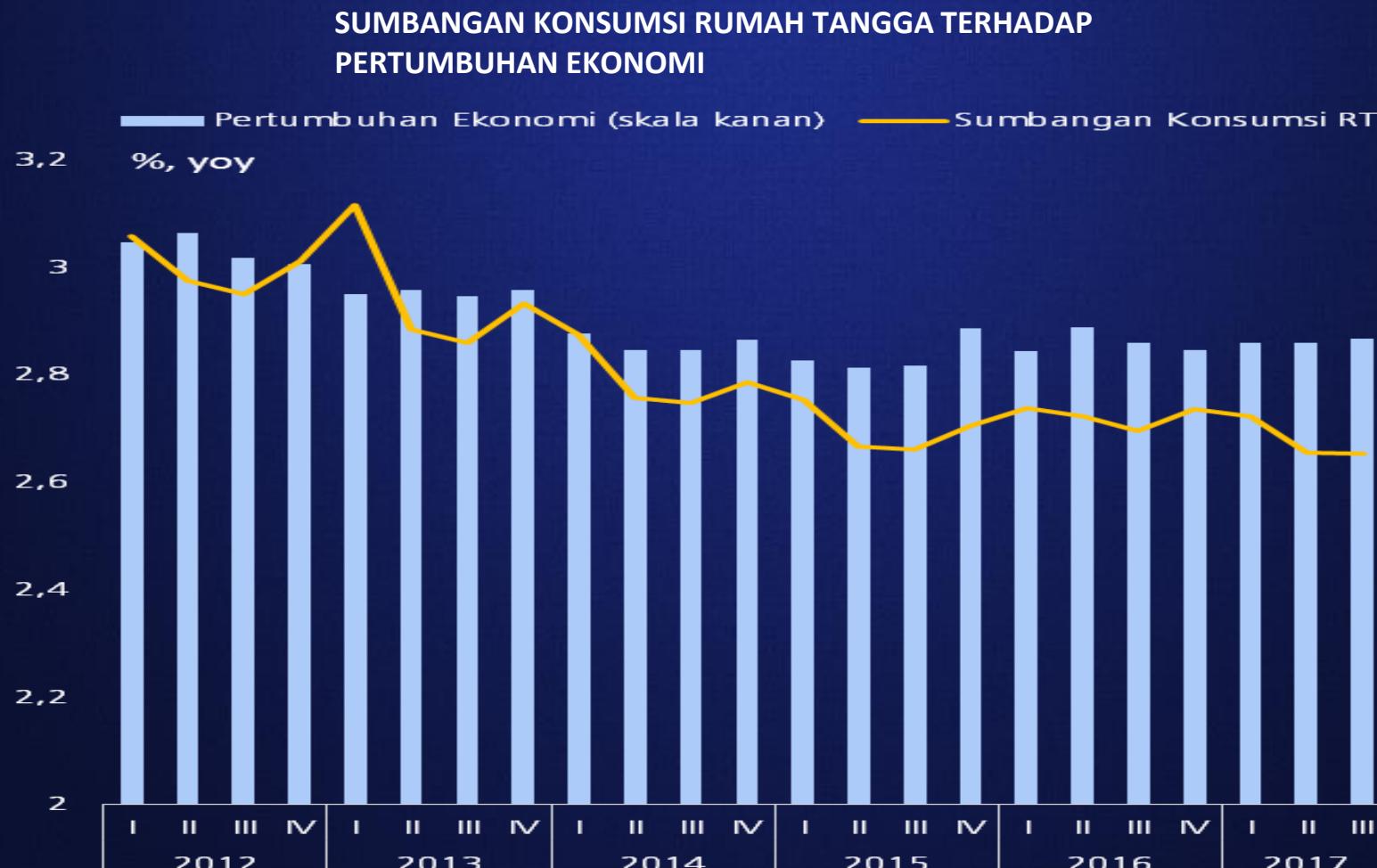


Sumber: Global Financial Stability Report, IMF, Oktober 2017

Sumber: Bloomberg (diolah)

Tantangan Perekonomian Domestik

Ekonomi domestik belum optimal dalam merespons pemulihan ekonomi global, ditandai oleh masih terbatasnya peran konsumsi rumah tangga serta pemulihan ekspor yang belum merata. Selain itu, pertumbuhan kredit juga belum sepenuhnya pulih...



Tantangan Struktural – Sektor Keuangan

Belum optimalnya pembiayaan domestik yang menyebabkan ketergantungan terhadap luar negeri dalam pembiayaan pembangunan. Hal ini ditandai kepemilikan SBN oleh non residen yang semakin meningkat serta DSR yang tinggi...

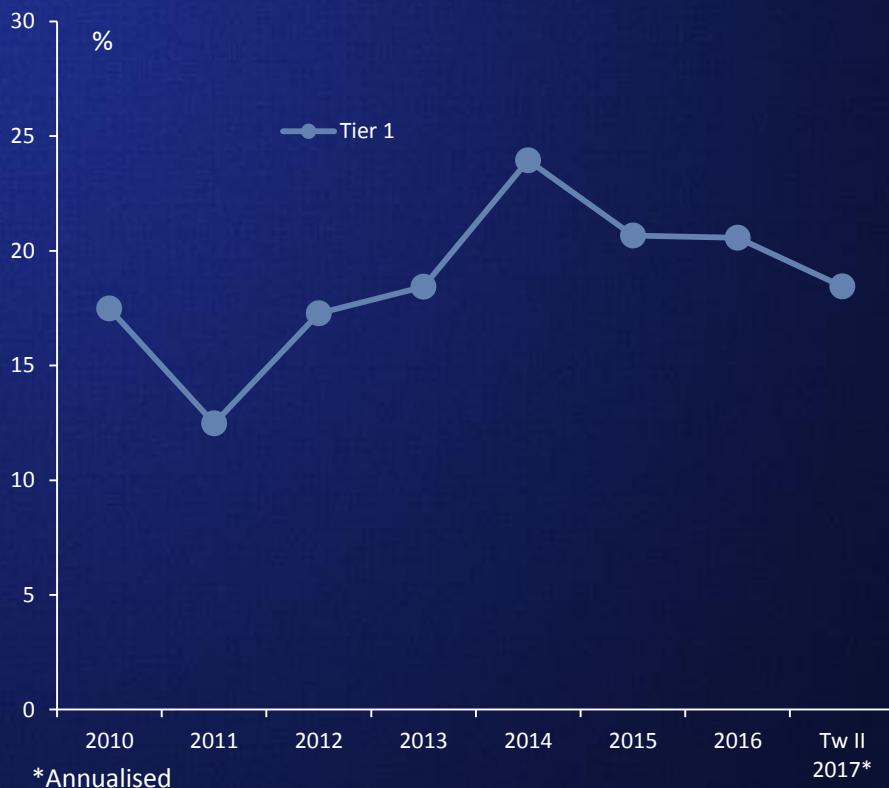
POSISI KEPEMILIKAN SBN



Sumber: KPEI (diolah)

*Per September 2017

DEBT SERVICE RATIO INDONESIA

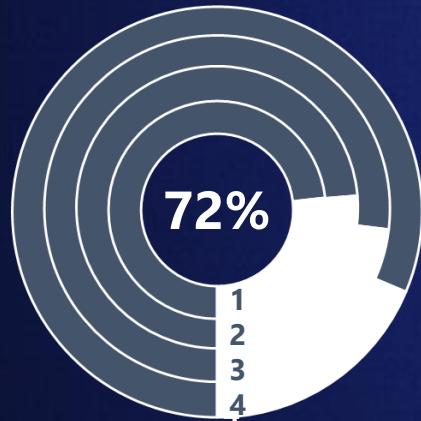


Tier 1: pembayaran pokok dan bunga atas utang jangka panjang dan pembayaran bunga atas utang jangka pendek

Sumber: Bank Indonesia

Tantangan Struktural – *Distance to Frontier*

Indonesia menghadapi tantangan struktural yang membatasi pertumbuhan ekonomi jangka menengah panjang...

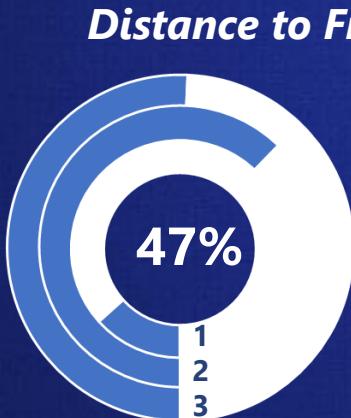


Quality of Overall Infrastructure

Frontier= Korea
(Global Competitiveness Index 2017)

1. Roads
2. Railroad infrastructure
3. Port infrastructure
4. Air transport infra.

RPJMN, PSN, dan Proyek Prioritas infrastruktur

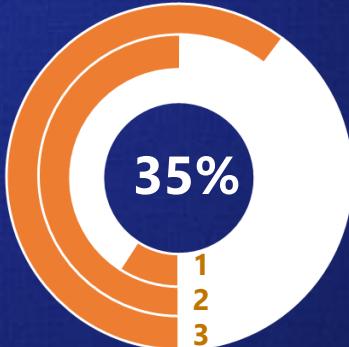


Institutions

Frontier= Hungary
(Product Market Regulation – OECD 2013)

1. Barriers to trade and investment
2. Barriers to entrepreneurship
3. State control

Paket Kebijakan Ekonomi dan Regulasi Lainnya

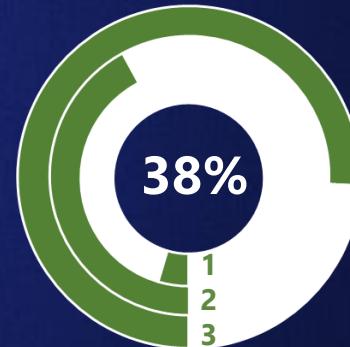


Human Capital & Research

Frontier= Korea
(Global Innovation Index 2017)

1. Research & development (R&D)
2. Tertiary education
3. Basic education

Pemerintah menerbitkan rencana strategis RPJMN



Innovation

Frontier= USA
(Global Innovation Index 2017)

1. Knowledge creation
2. Knowledge diffusion
3. Knowledge impact

Pemerintah mendorong kolaborasi perguruan tinggi dengan industri

Prospek Perekonomian Jangka Menengah

30

GNI per Capita (Current US\$)

High Income (\$ 12,736)

optimis

baseline

pesimis

2022

5,8 – 6,2%



2017

- Pertumbuhan PDB rendah
- Biaya logistik tinggi
- Ekspor *commodity based*
- Ketergantungan impor yang tinggi
- Deindustrialisasi
- *Service deficit*
- Pembiayaan domestik
- Kuantitas dan kualitas pendidikan yang rendah
- inovasi yang rendah
- Banyak regulasi

CAPITAL

HUMAN CAPITAL

TFP



Infrastruktur



Pendidikan



Inovasi



Institusi

REFORMASI STRUKTURAL

STRONG

SUSTAINABLE

BALANCE
GROWTH



STABILITAS MAKROEKONOMI DAN SISTEM KEUANGAN



ARAH KEBIJAKAN BANK INDONESIA

Arah Kebijakan Bank Indonesia (2)

Bank Indonesia secara konsisten menempuh bauran kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan...



KEBIJAKAN MONETER

Stance Kebijakan: kebijakan moneter yang terukur dan sesuai dengan upaya menjaga inflasi dalam kisaran sasarnya, dan mengendalikan defisit transaksi berjalan pada tingkat yang aman



KEBIJAKAN NILAI TUKAR

Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar sesuai dengan fundamentalnya dengan tetap mendukung bekerjanya mekanisme pasar



KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL

Diarahkan untuk memperkuat resiliensi sistem keuangan terhadap risiko sistemik, melalui implementasi *Macroprudential Liquidity Buffer*, penguatan *Loan to Funding Ratio* (LFR), Penerapan LTV secara *targeted*, pengembangan UMKM dan implementasi *blueprint* ekonomi dan keuangan syariah

Arah Kebijakan Bank Indonesia (3)

Bank Indonesia juga mendorong reformasi struktural dengan menempuh berbagai kebijakan guna meningkatkan efisiensi perekonomian nasional...



KEBIJAKAN SISTEM PEMBAYARAN

Diarahkan untuk membentuk ekosistem non tunai yang saling terhubung, terjangkau, inovatif, kompetitif, serta melindungi penggunanya, melalui Gerbang Pembayaran Nasional, sinergi program elektronifikasi dengan program pemerintah, dan penerapan Aturan bagi pelaku Teknologi Finansial, termasuk *e-commerce*



PENDALAMAN PASAR KEUANGAN

Mengakselerasi pendalaman pasar keuangan dengan menyusun Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan bersama otoritas terkait, serta meningkatkan efisiensi melalui penguatan regulasi, kelembagaan, infrastruktur, dan mengembangkan instrumen jangka pendek serta lindung nilai valuta asing sesuai kebutuhan pasar.



KEBIJAKAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Memastikan uang rupiah layak edar dalam jumlah yang cukup, dan pecahan yang sesuai, terdistribusi ke seluruh wilayah NKRI, serta melindungi masyarakat dari risiko uang palsu.



EKONOMI & KEUANGAN SYARIAH

Mendorong implementasi blueprint ekonomi dan keuangan syariah dengan menggunakan tiga strategi: Pendalaman pasar keuangan syariah & penguatan keuangan syariah untuk pembiayaan, Pemberdayaan ekonomi syariah, serta Penguatan riset, asesmen, dan edukasi

Arah Kebijakan Moneter



Arah Kebijakan Moneter

Bank Indonesia akan terus menempuh *stance* kebijakan moneter yang terukur dan sesuai dengan upaya menjaga inflasi dalam kisaran sasarannya, dan mengendalikan defisit transaksi berjalan pada tingkat yang aman...



1

Memperkuat operasi moneter

Memperkuat OM untuk memberikan ruang fleksibilitas pengelolaan likuiditas bank dalam mengelola likuiditas, yang selanjutnya akan membantu terjaganya stabilitas suku bunga pasar uang

2

Kebijakan nilai tukar

Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar sesuai dengan fundamentalnya dengan tetap mendukung bekerjanya mekanisme pasar

3

Upaya pendalamkan pasar keuangan

Penguatan regulasi, kelembagaan, infrastruktur, dan mengembangkan instrumen jangka pendek serta lindung nilai valuta asing sesuai kebutuhan pasar

Penyempurnaan Kebijakan GWM Rata-Rata

Penyempurnaan kebijakan akan ditempuh dengan memperluas implementasi GWM Rata-rata hingga mencakup GWM rupiah dan GWM valas baik bank konvensional maupun bank syariah...

- Penyempurnaan juga akan ditempuh dengan menyesuaikan rasio dan memperpanjang masa pemenuhan GWM Rata-rata.
- Penyempurnaan akan dilakukan secara bertahap dan terukur, dengan memperhatikan kondisi pasar keuangan dan kesiapan perbankan.

TUJUAN GWM RATA-RATA



Pasca implementasi GWM rata-rata, unsur prudensial tetap terjaga dgn kombinasi supervisi dan ketentuan (a.l. CAR dan LCR), penjaminan simpanan, dan fasilitas likuiditas bank sentral (a.l. FLI, LF)

Arah Kebijakan Nilai Tukar

Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar sesuai dengan fundamentalnya dengan tetap mendukung bekerjanya mekanisme pasar...

1

**Mengurangi
ketergantungan pada mata
uang tertentu**

Memperkuat kerjasama bilateral untuk meningkatkan penyelesaian transaksi perdagangan bilateral menggunakan *Local Currency Settlement* (LCS), melalui:

- Pengembangan skema LCS yang difasilitasi oleh otoritas/bank sentral seperti *Bilateral Currency Swap Arrangement* (BCSA) dan skema LCS berbasis *Appointed Cross Currency Dealers* (ACCD) yang melibatkan peran otoritas dan sektor swasta
- Mengembangkan *swap lindung nilai non dolar AS* kepada BI dengan memperluas jenis mata uang yang dapat ditransaksikan

2

**Memperkuat mitigasi risiko
korporasi non bank dalam
melakukan pengelolaan ULN**

Penyempurnaan pengaturan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan ULN korporasi non bank, khususnya perluasan cakupan ULN

3

**Mendorong bank domestik
untuk menyediakan
instrumen lindung nilai yang
efisien bagi korporasi**

Mendorong perbankan domestik menyediakan instrumen lindung nilai yang lebih efisien bagi korporasi, antara lain melalui penggunaan *structured product* seperti *Call-Spread Options*

Arah Kebijakan Pendalaman Pasar Keuangan
Arah Kebijakan Ekonomi Syariah



Program Pendalaman Pasar Keuangan 2017

39

PENGATURAN DI PASAR UANG

1

Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang

- PBI No.19/2/PBI/2017
- PADG No.19/7/PADG/2017



2

Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang

- PBI 19/9/PBI/2017
- PADG 19/9/PADG/2017 tentang LPPU



3

Pengaturan Market Operator
(On Progress)

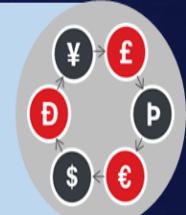


PENGATURAN DI PASAR VALAS

1

Ketentuan & Implementasi Local Currency Settlement

- PBI No.19/11/PBI/2017
- PADG Ekstern



2

Pedoman Pelaksanaan
Penerbitan Jakarta Interbank
Spot Dollar Rate



STANDARISASI, RISET & ASESMEN

1

Penyempurnaan Pedoman SOP Hedging BUMN



2

Analisis Kebijakan: Global Margining Rule – PBI Margining Rule



3

Kajian Supply Transaksi Derivative



4

Strategi Nasional Pengembangan
dan Pendalaman Pasar Keuangan



5

Pembentukan TF Central Clearing Counterparty (CCP)



PENGUATAN KREDIBILITAS PASAR

1

Sertifikasi Tresuri dan Penerapan
Kode Etik Pasar

- PBI No.19/5/PBI/2017
- PADG No.19/5/PBI/2017



2

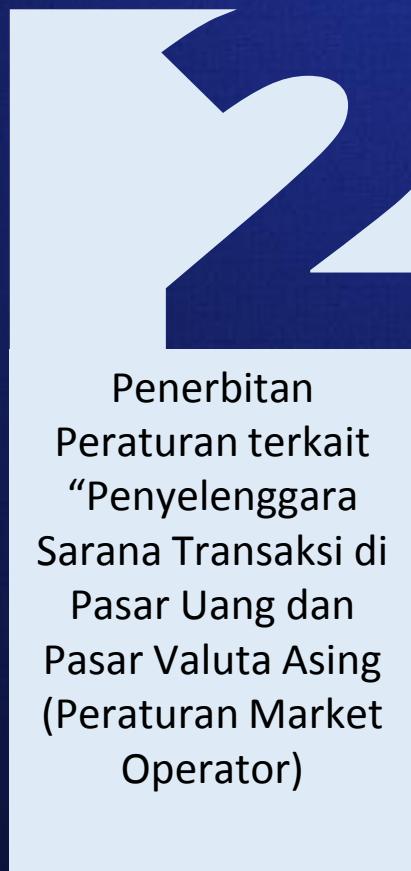
Penyempurnaan Pricing Guideline
JIBOR (On Progress)



Arah Kebijakan Pendalaman Pasar Keuangan

Mengakselerasi pendalaman pasar keuangan bersama **Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan** dengan menyusun **Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan...**

- Serta meningkatkan efisiensi penguatan regulasi, kelembagaan, infrastruktur, dan mengembangkan instrumen jangka pendek, seperti Surat Berharga Komersial (SBK) dan NCD serta instrumen lindung nilai di pasar valuta asing yang sesuai kebutuhan pasar.



Penyusunan Strategi Nasional

Bank Indonesia senantiasa membangun sinergi dengan otoritas terkait untuk menciptakan sumber-sumber pembiayaan ekonomi baru...

- Melalui Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK), Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan akan menyusun Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SN-PPPK)
- Melalui SN-PPPK untuk pertama kalinya Indonesia memiliki visi bersama dan program kerja terukur menuju terbentuknya pasar keuangan Indonesia yang lebih kuat.
- Selain itu, ketiga otoritas memiliki Program Pendampingan bersama , untuk mendukung pembiayaan program infrastruktur prioritas melalui pasar keuangan dalam bentuk debottlenecking solusi permasalahan.

SN-PPPK

elaborasi rencana kerja yang dibangun atas tiga pilar pengembangan, meliputi:

1

Sumber pembiayaan ekonomi dan pengelolaan risiko

2

Pengembangan infrastruktur pasar keuangan

3

Koordinasi kebijakan, harmonisasi ketentuan, dan edukasi

Peran dalam Reformasi Struktural

Bank Indonesia sepenuhnya mendukung dan memfasilitasi reformasi struktural melalui pemberian pembiayaan pembangunan infrastruktur, sejalan dengan inisiasi pendalaman pasar keuangan...

1

Infra-Bond & Sekuritisasi Aset



2

Instrumen Hedging



3

IDR Linked Bond



4

Skema PPP



- Mendukung penerbitan infra-bond dan sekuritisasi aset untuk pembiayaan proyek infrastruktur
- *Credit enhancement* dan optimasi pembiayaan pada proyek *Brownville*

- Mengembangkan instrumen hedging nilai tukar dan suku bunga (a.l. CCS, IRS, CSO)
- Memfasilitasi pelaksanaan transaksi hedging beberapa BUMN (Penyusunan SOP Hedging)

- Mendukung penerbitan IDR-Linked Bonds (*Nasi Goreng/ Komodo Bonds*)
- Inovasi dan alternatif pembiayaan untuk proyek Jasa Marga

- Mendukung skema pembiayaan Public Private Partnership (PPP) untuk pembiayaan infrastuktur
- Credit Enhancement melalui skema risk sharing

Arah Kebijakan: Ekonomi dan Keuangan Syariah

Mendorong Koordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk mengimplementasikan blue print ekonomi dan keuangan syariah yang telah diluncurkan

1

Pendalaman Pasar Keuangan syariah dan Penguatan Keuangan Syariah untuk pembiayaan

- Penerbitan ketentuan NCD Syariah
- Penerbitan instrumen keuangan syariah berbasis wakaf
- Penerbitan instrumen sukuk berbasis wakaf & pembiayaan berbasis ISF

2

Pemberdayaan Ekonomi Syariah

- Pengembangan halal value chain
- Dukungan pendirian kawasan ekonomi syariah
- Penguatan kelembagaan dan infrastruktur pendukung termasuk pendirian WIIB

3

Penguatan Riset, Asesmen, dan Edukasi

- Akselerasi aktivasi sistem informasi zakat dan wakaf
- Penyusunan kurikulum ekonomi dan keuangan syariah untuk berbagai jenjang tingkat pendidikan
- Dukungan pendirian International Awqaf Institute

Arah Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan



Arah Kebijakan Makroprudensial

Kebijakan Makroprudensial tetap diarahkan untuk memitigasi risiko sistemik melalui penguatan likuiditas dan fungsi intermediasi perbankan

1

Implementasi
Makroprudential Liquidity Buffer (MPLB)

Memperkuat Likuiditas Sistem Perbankan

2

Implementasi Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIMP)

Memperkuat Intermediasi Perbankan yang Berkualitas

3

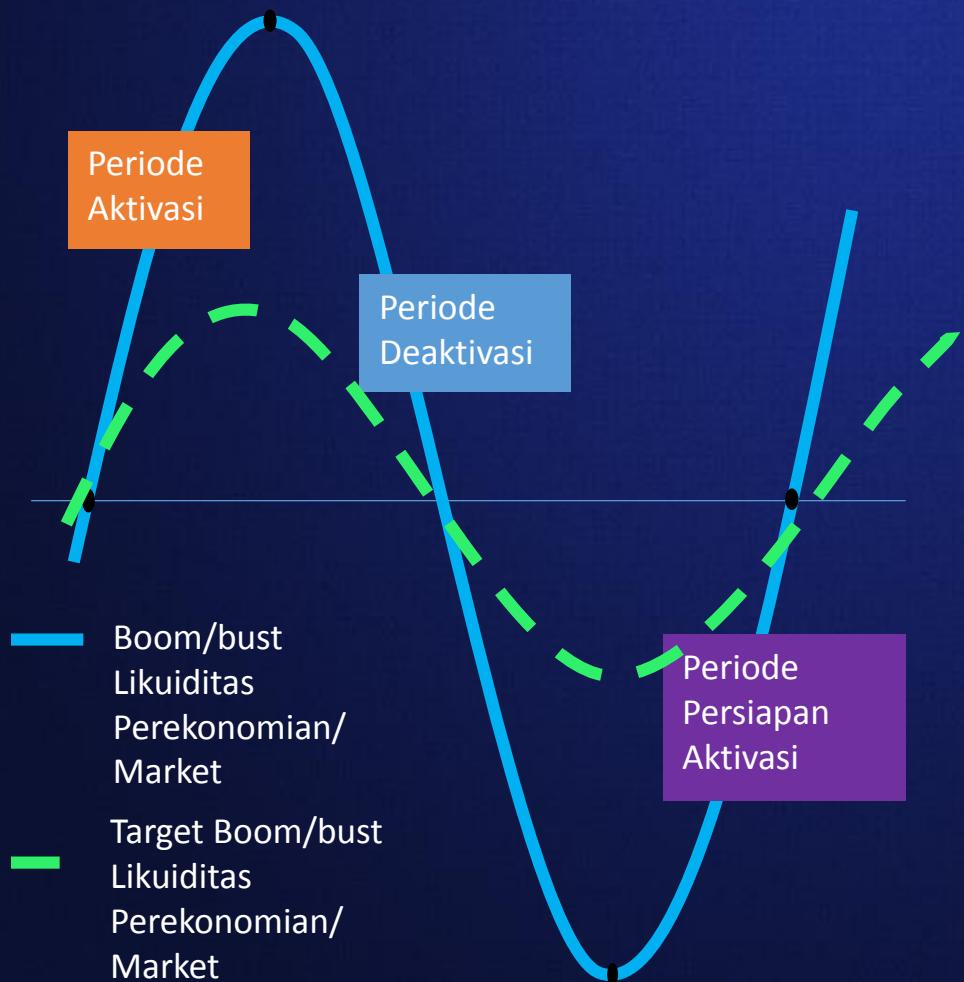
Implementasi *Loan to Value* (LTV) secara *targeted*

Memperkuat Intermediasi Perbankan yang Berkualitas

Makroprudential Liquidity Buffer - MPLB

MPLB merupakan kebijakan yang wajibkan bank untuk memelihara Surat-surat Berharga (SSB) dengan prosentase tertentu dari DPK.

- Kebijakan ini akan menjadi *macroprudential tools* dengan mempertimbangkan siklus keuangan dan kondisi likuiditas di sistem keuangan.



$$\frac{\text{SSB}^*)}{\text{DPK}} \geq \% \text{ tertentu}$$

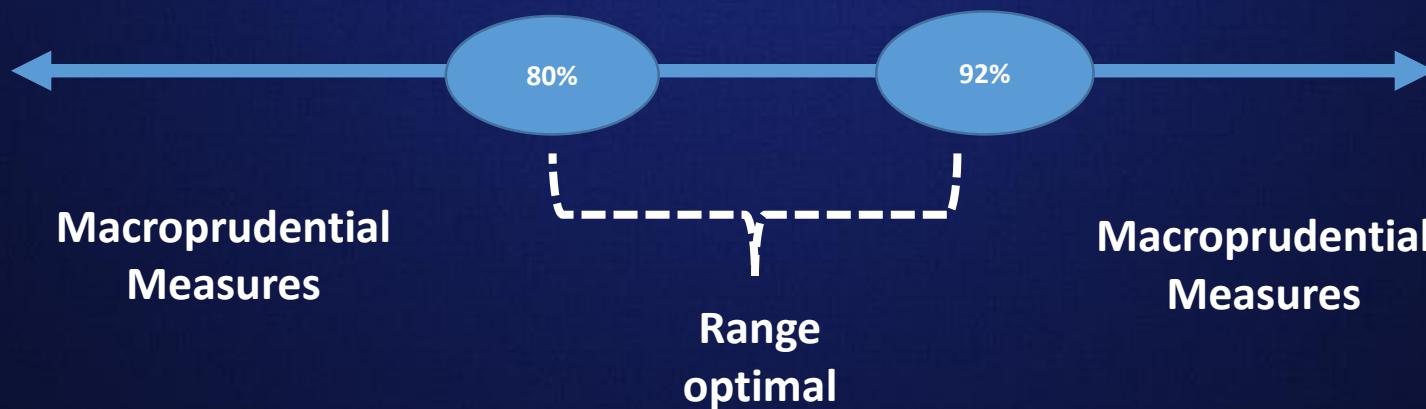
*) SSB mencakup SSB yang dimiliki bank yang dapat direpotkan ke BI sesuai ketentuan Operasi Moneter. Akan diberikan fleksibilitas dimana bagian tertentu dapat direpotkan ke BI dan tetap diperhitungkan MLB.

Rasio Intermediasi Makroprudensial - RIMP

RIMP merupakan bentuk penguatan dari Loan to Funding Ratio (LFR), dimana RIMP juga mengakomodasi adanya keberagaman bentuk intermediasi perbankan dengan memasukkan investasi bank pada surat berharga

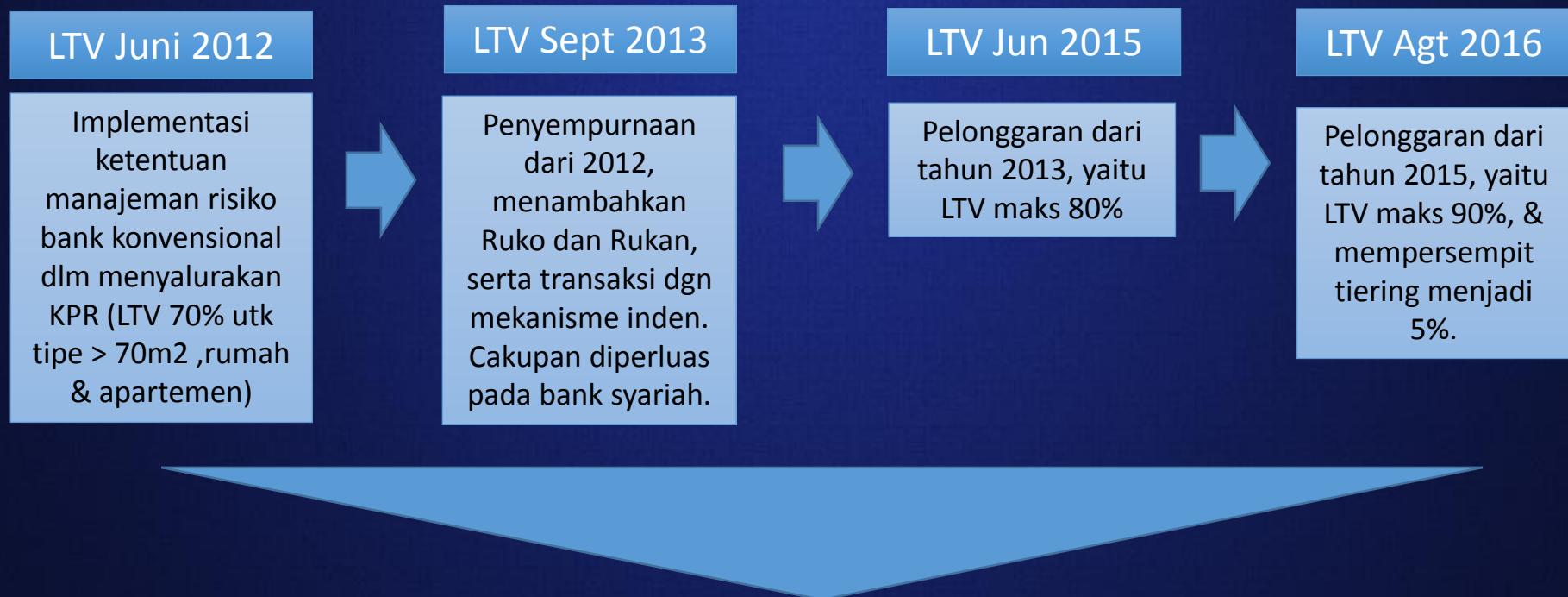
Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIMP)

$$\text{RIMP} = \frac{\text{Loan} + \text{SSB yang Dimiliki oleh bank}}{\text{Deposits} + \text{SSB yang Diterbitkan oleh bank}}$$



Kebijakan LTV Secara Targeted

Dalam rangka meningkatkan efektivitas instrumen makroprudensial maka akan dipertimbangkan opsi untuk menerapkan Kebijakan LTV secara targeted untuk memitigasi risiko terjadinya bubble sektor tertentu secara lebih spesifik



Mengkaji Penerapan LTV secara targeted, antara lain:

- Pendekatan jenis properti
- Pendekatan tipe properti
- Pendekatan spasial

Arah Kebijakan UMKM

Sejalan dengan komitmen peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, BI turut mendorong pengembangan UMKM a.l. untuk memperkuat pengendalian inflasi dari sisi suplai....

Program Pengembangan UMKM oleh Bank Indonesia



Pengendalian inflasi dari sisi suplai, khususnya komoditas pangan yg berdampak pada inflasi VF
(value chain approach)



Peningkatan Kapabilitas UMKM melalui program Kewirausahaan



Mendorong komitmen bank untuk memenuhi Rasio Kredit UMKM minimal 20% pada tahun 2018

*Arah Kebijakan Sistem Pembayaran – Pengelolaan
Uang Rupiah*



Arah Kebijakan Sistem Pembayaran & Pengedaran Uang Rupiah - SPPUR

Kebijakan SPPUR diarahkan pada upaya mendorong efisiensi perekonomian nasional, melalui langkah-langkah penguatan kebijakan, baik pada area sistem pembayaran non tunai maupun pengelolaan uang rupiah yang berpijakan pada Blueprint SPPUR 2017-2024

01

Efisiensi Infrastruktur

Interkoneksi, interoperable, aman, melindungi konsumen, dan routing domestik

02

Elektronifikasi

Mendorong elektronifikasi di berbagai sektor (transportasi, bansos, pemerintah, dll)

03

Dukungan terhadap Digital Ekonomi

Menjaga level playing field melalui rezim regulasi yang berimbang dan proporsional

04

Penyediaan Uang Rupiah Layak Edar

Nominal yg cukup, jenis pecahan yg sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yg layak edar

05

Fungsi Pengawasan

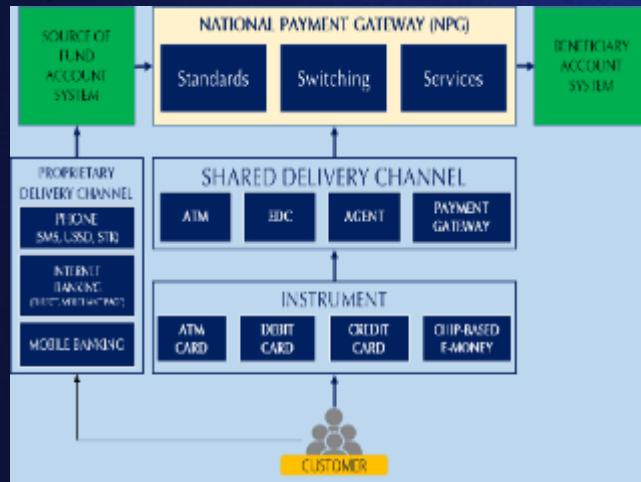
Memperkuat kerangka pengawasan berbasis risiko dan penegakan hukum atas praktik bisnis ilegal

**Blueprint Sistem
Pembayaran 2017-2024**



Efisiensi Infrastruktur

Mendorong interkoneksi dan interoperabilitas instrumen, kanal, dan infrastruktur pembayaran ritel domestik di bawah payung Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)



- Diluncurkan 4 Desember 2017
- logo nasional untuk transaksi domestik di seluruh instrumen



Arah ke depan

GPN sebagai backbone transaksi ritel nasional

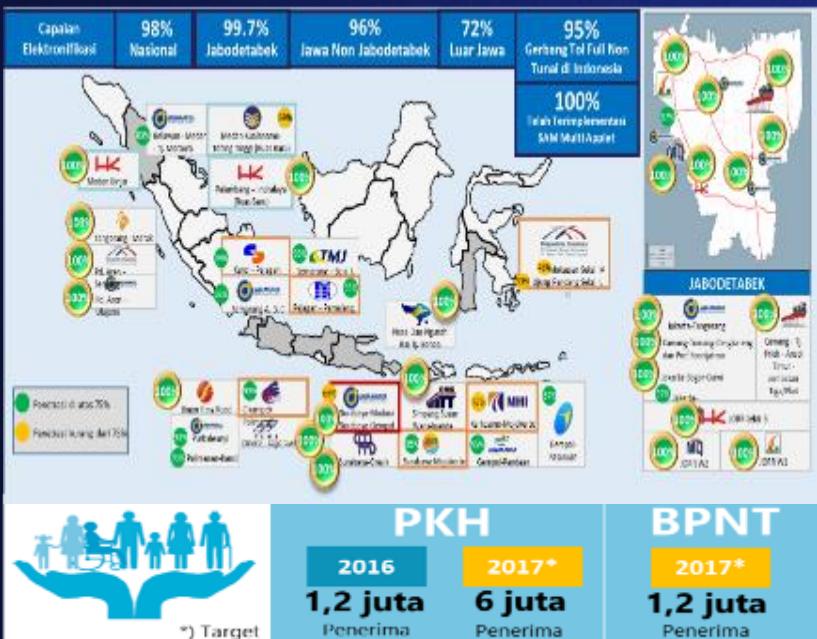
- Memperkuat kelembagaan NPG (penetapan lembaga standar UE dan lembaga services beroperasi penuh)
- Mengawal migrasi industri
- Pengembangan dan perluasan cakupan (EBIPP, Standar QR Code, Kartu Kredit)



Elektronifikasi

Memperkuat elektronifikasi yang diantaranya disinergikan dengan berbagai program pemerintah dan terus mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan tata kelola transaksi keuangan pemerintah pusat dan daerah

- 1 Elektronifikasi jalan tol yang telah mencapai 98% dari seluruh ruas tol nasional
- 2 Penyaluran Bansos non tunai berupa PKH kepada 6 juta KPM dan BPNT kepada 1,2 juta KPM



Arah Kebijakan Kedepan



Moda Transportasi

Interoperabilitas dan interkoneksi sistem pembayaran elektronik terintegrasi antar moda

Bantuan Sosial

Perluasan penyaluran bantuan non tunai kepada 10 juta KPM untuk PKH dan 3,9 juta KPM untuk BPNT



Jalan Tol

Mendukung perluasan interkoneksi jalan tol melalui Implementasi Electronic Toll Collection (ETC) dan Multi Lane Free Flow (MLFF)

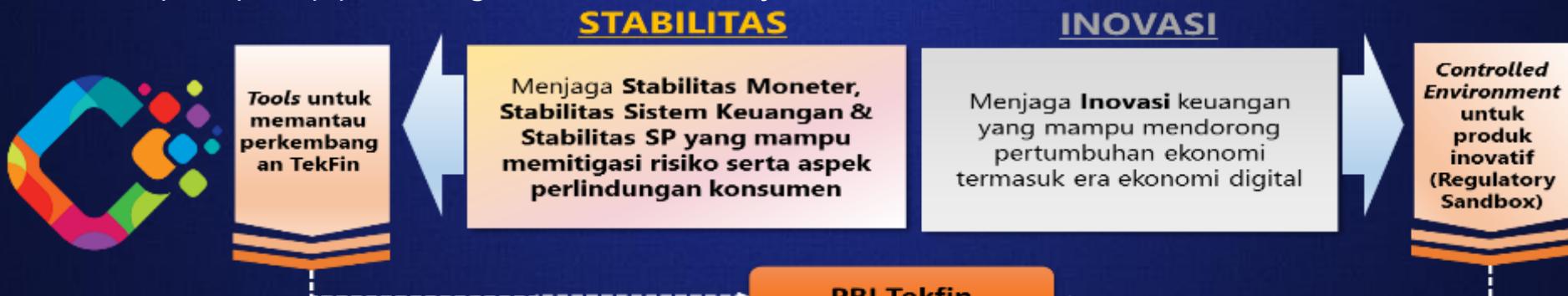
Cash Management System

Me non-tunai kan berbagai pembayaran dan belanja pemerintah (a. **Bantuan Desa**, **Bantuan Operasional Sekolah**)

Ekonomi Digital

Mendukung perkembangan teknologi dengan sinergi kebijakan yang baik antar otoritas untuk membangun industri sistem pembayaran dan keuangan nasional yang sehat

- BI merespon perkembangan TekFin melalui dua sisi secara berimbang baik, yaitu mendorong inovasi dan dalam menjaga stabilitas perekonomian, yang dituangkan dalam penguatan rezim regulasi dan kelembagaan
- Regulasi tekfin diharapkan dapat mendorong laju inovasi yang dilakukan Penyelenggara TekFin dengan tetap menerapkan prinsip perlindungan konsumen, manajemen risiko dan kehati-hatian



Prinsip Umum
Perlindungan konsumen,
manajemen risiko dan
kehati-hatian



Virtual Currency

Penyelenggara Tekfin dilarang
melakukan transaksi menggunakan VC

Ruang Lingkup
Pendaftaran,
Regulatory Sandbox,
Perizinan,
Pemantauan &
Pengawasan



APU PPT

TekFin Harus menaati
ketentuan termasuk APU PPT

STABILITAS

Menjaga **Stabilitas Moneter**,
Stabilitas Sistem Keuangan &
Stabilitas SP yang mampu
memitigasi risiko serta aspek
perlindungan konsumen

INOVASI

Menjaga **Inovasi** keuangan
yang mampu mendorong
pertumbuhan ekonomi
termasuk era ekonomi digital

Controlled Environment
untuk produk
inovatif
(*Regulatory Sandbox*)

Arah Kebijakan Kedepan

- **Mengawal dan memperkuat implementasi pendaftaran Tekfin**
- **Implementasi Regulatory Sandbox**
- **Enforcement terhadap larangan penggunaan Virtual Currency**

Pengawasan SP

Dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan di bidang SPPUR, Bank Indonesia akan terus memperkuat kerangka pengawasan berbasis risiko dan penegakan hukum atas praktik bisnis ilegal

KUPVA BB

Sejak Maret 2017 hingga November 2017, jumlah KUPVA BB tidak berizin yang telah ditertibkan mencapai **916 KUPVA BB tidak berizin dari total 964 (95%)**

Penyelenggara Transfer Dana

- ❑ Pada tahun 2016, BI telah menertibkan 3 penyelenggara transfer dana ilegal
- ❑ Sebagian besar PTD (82%) telah menerapkan APU PPT dengan baik



FATF dalam Mutual Evaluation menilai KUPVA dan PTD telah melaksanakan APU PPT sesuai rekomendasi

HASIL PENILAIAN TIM ASSESSOR FATF-APG

BI dinilai Cukup Efektif dalam penerapan APU PPT.



- SRA dinyatakan *sound & reasonable*,
- Pengawasan BI cukup kuat,
- Sudah menerapkan RBA (*Risk Based Approach*).
- Penyelenggara yang dijadikan sampel dinilai sudah *aware* dan telah menerapkan APU PPT.
- BI sudah memiliki mekanisme kerjasama internasional.

TINDAK LANJUT ME 2017



Penguatan Risk Based Approach



Penerusan daftar dan Pemeriksaan kepatuhan DTTOT & Proliferasi



Penertiban PTD tidak berizin dan expose di media massa



Kerjasama Internasional untuk pertukaran informasi money remittance



Penguatan kapasitas (kompetensi dan sistem informasi)

Penyediaan Uang Layak Edar

Kedepan BI akan terus memperluas jangkauan layanan kas guna memastikan tersedianya uang Rupiah layak edar kepada seluruh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia



Arah Kebijakan Kedepan

1

Menjaga pasokan rupiah yang berkualitas dan penanggulangan pemalsuan uang



2

Memperkuat Sinergi Layanan Kas



3

Standarisasi & Pengawasan Pengolahan Uang (External)



SINERGI LAYANAN KAS

01

KAS TITIPAN

Kerjasama layanan kas dg Perbankan untuk menjangkau seluruh kabupaten / kota

02

BI JANGKAU

Kerjasama layanan kas untuk menjangkau hingga tingkat Kecamatan dan Wilayah 3T dan Perbatasan Negara

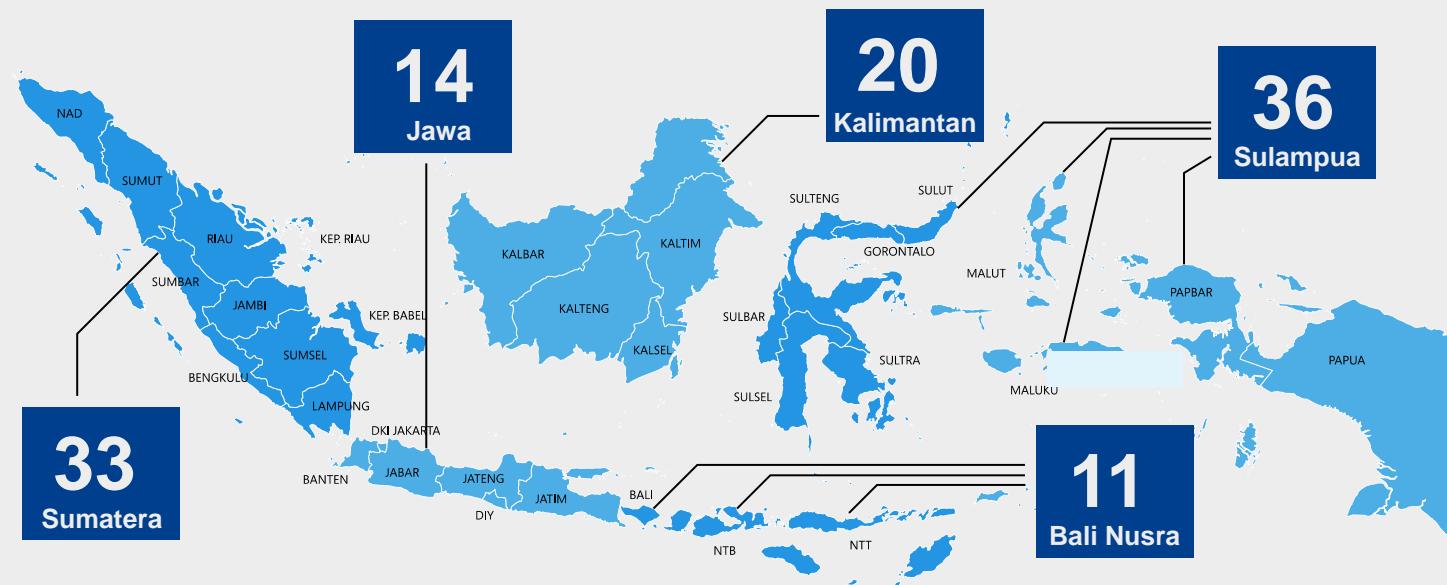
03

KAS KEPULAUAN

Kerjasama layanan dg TNI AL & Pol Air untuk menjangkau kepulauan yang sangat sulit di jangkau

Coverage Layanan Kas

Pada akhir tahun 2017, Bank Indonesia dapat menjangkau seluruh Kabupaten / Kota di Indonesia, baik yang dilayani langsung oleh BI maupun melalui layanan Kas Titipan.



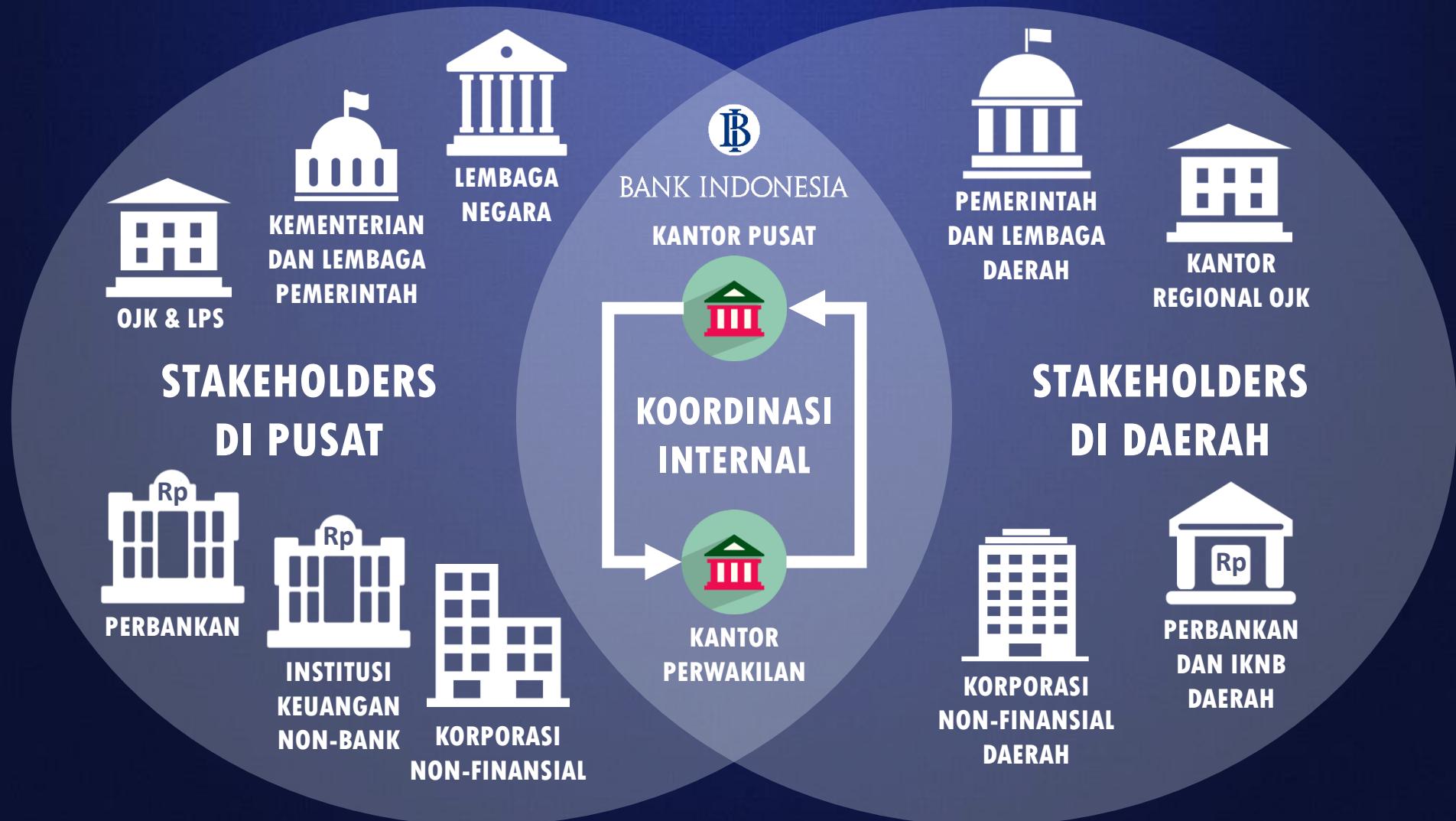
*) Labuha, Sumbawa, Buntok, Polewali Mandar, Liwa, Batu Raja, Bone, Kebumen, Manna, Kabarjahe, Putussibau, Pohuwato, Kudus, Subang, Bojonegoro, Poso, Natuna, Madiun, Serui, Waikabubak, Cilacap, Pekalongan, Takengon, Kep. Meranti, Parigi Moutong, Nabire, Kandangan, Malinau, Lamandau, Subulussalam, Alor, Ponorogo, Musi Banyuasin, Bitung, Namlea, Muko-Muko, Sarolangun, Murung Raya, Muna, Pasang Kayu, Kuala Kapuas, Melonguane, Kep. Sitaro, Sorong Selatan, Pangandaran, Meulaboh, Saumlaki, Pasir Pangairan, Kisaran, Kuala Tungkal, Sumenep, Langkat, Morowali
 **) memperhitungkan penutupan Kas Titipan Serang

Koordinasi Kebijakan



KOORDINASI KEBIJAKAN DI PUSAT DAN DAERAH

Kebijakan Bank Indonesia akan selalu dikoordinasikan dan diselaraskan dengan pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun di daerah.



PENGUATAN MEDIA KOORDINASI KEBIJAKAN

Media koordinasi dengan Pemerintah yang sudah ada akan terus diperkuat.



- Round Table Policy Dialogue (RTPD)
- Tim Pengendalian Inflasi (TPI) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
- Rakor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia (Rakorpusda)
- Investor Relation Unit (IRU) di Pusat dan Daerah
- Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)
- Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FKPPPK)
- Forum Sistem Pembayaran Indonesia (FSPI)

KOORDINASI KEBIJAKAN DALAM TATANAN INTERNASIONAL

Bank Indonesia akan terus mendukung Pemerintah untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perjanjian perdagangan internasional dan membangun persepsi positif investor terhadap ekonomi Indonesia.



Koordinasi terkait desain perjanjian perdagangan internasional yang memiliki strategi dan mekanisme kerja yang komprehensif.



Koordinasi dengan Pemerintah dalam FTA/CEPA* untuk mengamankan ruang kebijakan dan menjaga konsistensi komitmen liberalisasi dengan arah pengembangan sektor jasa pembayaran.

BI juga akan terus memfasilitasi pelaksanaan *dedicated team meeting* sektor keuangan sebagai sarana koordinasi dan kalibrasi posisi masing-masing intansi dalam FTA/CEPA.



BI akan terus mendukung Pemerintah dalam mendorong perbaikan *Sovereign Credit Rating* Indonesia, termasuk memastikan terciptanya persepsi positif terhadap perekonomian Indonesia.

Penajaman fungsi hubungan investor BI di KPwDN (RIRU) dan KPwLN (GIRU)**, khususnya pada elemen kelembagaan, strategi hubungan investor, dan diseminasi data/informasi.

*) FTA = Free Trade Agreement; CEPA = Comprehensive Economic Partnership Agreement

**) RIRU = Regional Investor Relation Unit; GIRU = Global Investor Relation Unit

TERIMA KASIH

